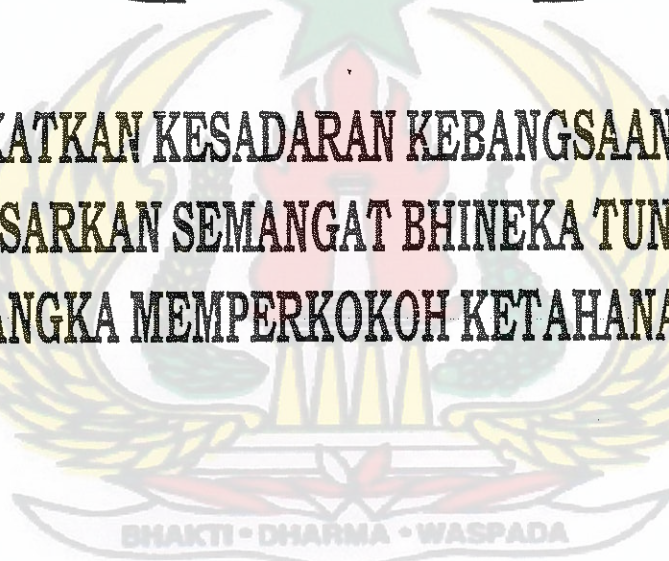
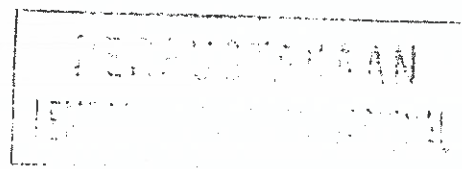


**MENINGKATKAN KESADARAN KEBANGSAAN INDONESIA
BERDASARKAN SEMANGAT BHINEKA TUNGGAL IKA
DALAM RANGKA MEMPERKOKOH KETAHANAN NASIONAL**

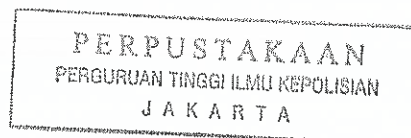


Oleh :

Drs. JULIUS BOBO



**KERTAS KARYA PERORANGAN (TASKAP)
KURSUS SINGKAT ANGKATAN IX LEMHANNAS
TAHUN 2001**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, penulis telah dapat mengikuti Kursus Singkat Angkatan IX tahun 2001 Lemhannas sesuai dengan jadwal waktu dan materi yang diagendakan Lembaga, sehingga sampailah penulis pada penulisan Kertas Karya Perorangan (TASKAP).

Taskap penulis berjudul : "PENINGKATAN KESADARAN KEBANGSAAN INDONESIA BERDASARKAN SEMANGAT BHINNEKA TUNGGAL IKA DALAM RANGKA MEMPERKOKOH KETAHANAN NASIONAL".

Pada saat ini masalah kebangsaan kita sedang menghadapi ujian yang berat, karena di beberapa daerah bagian negara Republik Indonesia ingin memisahkan diri dengan alasan Kebinekaan.

Dalam penulisan TASKAP ini penulis melakukan identifikasi dan inventarisasi pemecahan dengan landasan berpikir Pancasila, UUD 1945, Wasantara, Tannas dan GBHN serta Pokok-pokok UU terkait, bahwa dengan kesadaran kebangsaan kebhinekaan adalah merupakan kekuatan dan pemersatu dalam mewujudkan Ketahanan Nasional.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

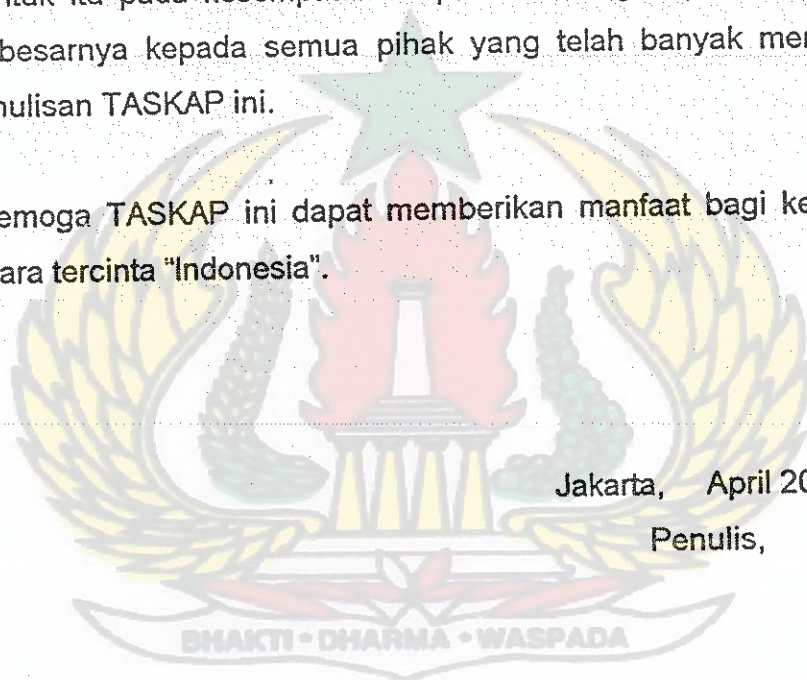
- Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Yth. Ibu Megawati Soekarno putri yang telah memberikan kepercayaan menugaskan penulis mengikuti Kursus Singkat Angkatan IX Lemhannas tahun 2001 mewakili PDI Perjuangan.

- Kepada Mayor Jenderal TNI. Drs. Bambang Ismaryanto, SH selaku Tutor yang telah banyak membimbing penulis sehingga penulisan TASKAP ini dapat diselesaikan dengan baik.

Selama mengikuti kursus penulis banyak mendapat dorongan dan kerjasama yang baik dengan Mayjen TNI. Amirul Isnaini, Mayjen TNI. Slamet Kirbiantoro, S.IP., Laksda TNI. Sahroni Kasnadi, Brigjen TNI (Mar) Agung Widjajadi S., S.IP, dan rekan-rekan peserta yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dan yang tidak pernah henti-hentinya memberikan motivasi Istri dan anak-anak tercinta.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu sampai pada penulisan TASKAP ini.

Semoga TASKAP ini dapat memberikan manfaat bagi kejayaan Bangsa dan Negara tercinta "Indonesia".



Jakarta, April 2001

Penulis,

Drs. JULIUS BOBO

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Umum	1
2. Maksud dan Tujuan	4
3. Ruang Lingkup dan Sistematika	4
4. Metode dan Pendekatan	6
5. Pengertian-pengertian	6
BAB II. LANDASAN BERPIKIR	
1. Umum	7
2. Pancasila sebagai Landasan Idiil	7
3. UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional	10
4. Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional	13
5. Tannas sebagai Landasan Konsepsional.....	13
6. GBHN sebagai Landasan Operasional	15
BAB III. KONDISI KESADARAN KEBANGSAAN INDONESIA DEWASA INI DAN PERMASALAHANNYA	
1. Umum	17
2. Kesadaran Kebangsaan Indonesia	17
3. Permasalahannya	34

BAB IV.	PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS	
1.	Umum	36
2.	Perkembangan Global	36
3.	Perkembangan Regional	39
4.	Perkembangan Nasional	41
5.	Peluang dan Kendala	44
BAB V.	KESADARAN KEBANGSAAN INDONESIA YANG DIHARAPKAN	
1.	Kehidupan Ideologi	47
2.	Kehidupan Politik	48
3.	Kehidupan Ekonomi	48
4.	Kehidupan Sosial Budaya	49
5.	Kehidupan Pertahanan dan Keamanan	49
BAB VI.	KONSEPSI PENINGKATAN KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA	
1.	Umum	51
2.	Kebijaksanaan	52
3.	Strategi	52
4.	Upaya-upaya	58
BAB VII.	PENUTUP	
1.	Kesimpulan	74
2.	Saran	76

LAMPIRAN :

BAB – I

PENDAHULUAN

1. Umum

Dalam Pidato Bung Karno almarhum tentang hadirnya Pancasila, 1 Juni 1945 perihal kebangsaan dikutip pemikiran dua tokoh besar, Ernest Renan dengan ucapannya bahwa dasar kebangsaan adalah hasrat untuk bersama dan Otto Baur, bahwa bangsa adalah komunitas bercita-cita yang tumbuh dari komunitas senasib.

Dengan mengacu pada dua tokoh tersebut Soekarno menegaskan sesuatu yang amat penting : Kesatuan Bangsa Indonesia tidak bersifat alami, melainkan historis. Artinya, berbeda dengan bangsa Korea, bangsa Indonesia bersatu bukan karena dipersatukan oleh satu bahasa ibu, atau oleh kesatuan suku, budaya ataupun agama. Dalam arti alami masyarakat-masyarakat di bumi Indonesia merupakan keanekaragaman (kemajemukan) dengan ratusan bahasa dan suku, budaya daerah dengan pluralitas agama serta adat istiadat, yang tersebar atas ribuan pulau yang secara geografis pun tidak dengan sendirinya mendukung persatuan Nusantara. Yang mempersatukan masyarakat-masyarakat di bumi Indonesia adalah sejarah yang di alami bersama, sebuah sejarah penderitaan, penindasan, perjuangan kemerdekaan dan tekad pembangunan dan reformasi kehidupan bersama.

Dari "nasib" bersama itu tumbuh hasrat untuk tetap bersama. Itulah dasar kesatuan bangsa Indonesia. Atas dasar itu bangsa Indonesia sekarang sudah menjalani setengah abad lebih dalam kebersamaan dengan pengalaman usaha dan perjuangan bersama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diproklamirkan 17 Agustus 1945. Dengan kata lain Persatuan Bangsa Indonesia tidak bersifat etnik melainkan etis.

Hal itu bukan alasan untuk berkecil hati, menurut Prof. Dr. Koentjaraningrat tidak ada 10 negara di dunia yang secara etnik homogen. Jadi situasi kebhinekaan etnik adalah keadaan yang biasa. Indonesia bukanlah

sebuah keterkecualian, melainkan kasus yang normal biasa, melainkan historis, tidak mesti merupakan kelemahan. Sebaliknya, apabila kesatuan sebuah bangsa bersifat etnik, jauh lebih sulit nasionalisme menghindar dari kesempatan chauvinisme. Nasionalisme bangsa yang majemuk kemungkinannya akan lebih seimbang dan positif.

Persatuan Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan dalam satu kesatuan dengan sila-sila lain Pancasila. Bahkan dalam kalimat-kalimat pertama terumuskan secara pragmatis : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan”. Kalimat ini menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia ke dalam kerangka hak segala bangsa atas kemerdekaan, penolakan terhadap penjajahan dan pengakuan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dalam bahasa sederhana : Nasionalisme Indonesia bukanlah kebencian terhadap bangsa-bangsa lain, melainkan cinta pada bangsa sendiri. Nasionalisme adalah darah hati bangsa Indonesia karena ia menggerakkan hati para warga negara Indonesia untuk mencintai tanah air, untuk bekerja bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat, untuk bersedia berkorban bagi Ibu Pertiwi, dengan sekaligus menghormati dan dalam batas kemampuan mereka serta mendukung kesejahteraan bangsa-bangsa lain.

Dapat dikatan bahwa Nasionalis Indonesia dalam pengertian Pancasila dan dalam konteks UUD 1945 memiliki lima ciri (Franz Magnes Suseno S.J. 1995) :

- a. Bhinneka Tunggal Ika, jadi tidak bersifat uniform, seragam, monolit dan totaliter melainkan mengakui kebhinekaan budaya, bahasa, adat dan tradisi lokal se-Nusantara. Segala usaha untuk meragamkan budaya bangsa Indonesia justru akan menggerogoti kesadaran atas perasaan nasionalisme bangsa.
- b. Etis, karena selalu harus dipahami dalam kerangka lima prinsip etika politik Pancasila.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Makalah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai Kesadaran Kebangsaan Indonesia yang didasarkan atas semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan kebijaksanaan guna memperkokoh Ketahanan Nasional.

b. Tujuan

Sedangkan tujuannya adalah sebagai sumbang saran pemikiran penulis dalam ikut serta mengkaji sebagian masalah-masalah strategis nasional agar dikembangkan lebih lanjut dalam perumusan Kebijakan Nasional.

3. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Naskah ini membahas mengenai kesadaran kebangsaan Indonesia yang didasarkan atas semangat Bhinneka Tunggal Ika yang mesih perlu ditingkatkan dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan ancaman guna memperkokoh Ketahanan Nasional.

b. Sistematika

Adapun sistematika bahasan disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Membahas tentang pokok pikiran dan latar belakang kesadaran kebangsaan Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika dan permasalahannya yang dikaitkan dengan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

BAB II. DASAR PEMIKIRAN

Membahas tentang landasan yang digunakan sebagai acuan yaitu : Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan Rumusan Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam kaitannya dengan kesadaran Kebangsaan Indonesia.

BAB III. KONDISI KESADARAN KEBANGSAAN INDONESIA DEWASA NI DAN PERMASALAHANNYA

Membahas tentang potret keadaan bangsa Indonesia dalam menyadari rasa kebangsaannya sebagai bangsa Indonesia yang didasarkan atas keanekaragaman, kemajemukan etnis, bahasa, agama, adat istiadat, yang tersebar dalam beribu-ribu pulau Nusantara serta permasalahan yang dihadapi.

BAB IV. PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Membahas berbagai kecenderungan perkembangan lingkungan strategis utamanya berkaitan dengan materi bahasan baik lingkungan Global/Internasional, Regional dan Nasional sehingga dapat diidentifikasi peluang dan kendala dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran kebangsaan Indonesia.

BAB V. KESADARAN KEBANGSAAN INDONESIA YANG DIHARAPKAN

Bab ini berisi tentang kesadaran kebangsaan Indonesia yang diharapkan.

BAB VI. KONSEPSI MENINGKATKAN KESADARAN KEBANGSAAN INDONESIA BERDASARKAN SEMANGAT BHINNEKA TUNGGAL IKA DALAM MEMPERKOKOH KESATUAN NASIONAL

Membahas tentang kebijaksanaan dan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran kebangsaan Indonesia.

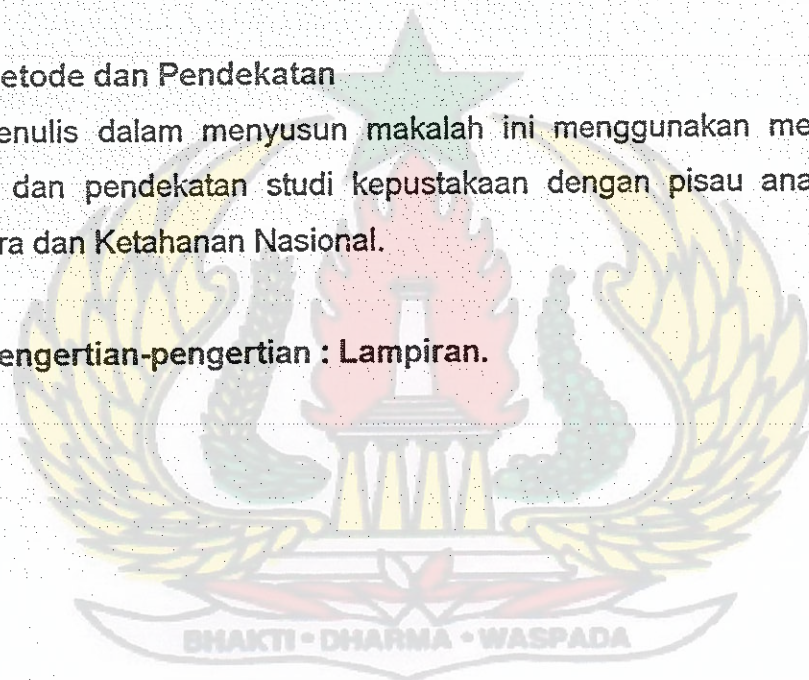
BAB VII. PENUTUP

Membahas tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai konklusi makalah.

4. Metode dan Pendekatan

Penulis dalam menyusun makalah ini menggunakan metode deskriptif analisis, dan pendekatan studi kepustakaan dengan pisau analisa Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

5. Pengertian-pengertian : Lampiran.



BAB – II

LANDASAN BERPIKIR

1. Umum

a. Dalam pergaulan antar bangsa/negara, suatu bangsa berpedoman pada ideologi, dasar negara maupun pandangan hidupnya, wawasan nasionalnya ataupun prinsip-prinsip kehidupan yang berlaku secara universal yang ditata/dirumuskan secara konstitusional. Sebagai bagian dari masyarakat dunia bangsa Indonesia di dalam melaksanakan pembangunan nasionalnya berlandaskan pada paradigma nasional yang disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia.

b. Paradigma nasional yang telah menjadi kesepakatan seluruh rakyat/masyarakat Indonesia yang dijadikan sebagai “landasan” dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu diaturlah tatanan kehidupan nasional yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis dan berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

2. Pancasila Sebagai Landasan Idil

a. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang berasal dari nilai-nilai yang hakiki sebagai suatu corak dari kehidupan sosial budaya yang luhur. Nilai-nilai luhur tersebut telah mengakar di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang diangkat oleh pendiri negara menjadi suatu pegangan dan sumber inspirasi rasa kebangsaan untuk mencapai suatu tujuan kehidupannya sebagai suatu pandangan hidup bangsa. Dengan pandangan hidup yang jelas maka bangsa Indonesia memiliki pedoman di dalam pembangunan dan memecahkan segala

macam permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum maupun pertahanan dan keamanan negara.

b. Nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan landasan inspirasi rasa kebangsaan Indonesia terkristalisasi di dalam perumusan lima silanya, yang oleh para pendiri bangsa dan negara diangkat kepermukaan kehidupan serta diformulasikan kedalam Pembukaan UUD 1945.

Formulasi Pancasila sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut adalah wujud dari hasil pemikiran bangsa dan negara yang menyadari "Kebhinekaan" bangsa dan negara yang pada saat itu masih berada di alam penjajahan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari bermacam-macam suku, agama, dan daerah-daerah dengan adat istiadat serta budaya yang berbeda satu dengan yang lainnya dan tersebar di kepulauan Indonesia yang terdiri dari 17.508 pulau. Menyadari akan hal tersebut maka para pendiri bangsa dan negara telah bertekad meletakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas dasar-dasar yang kokoh yang mampu menyatukan seluruh masyarakat Indonesia yang sangat majemuk tersebut. Dengan pandangan hidup Pancasila itulah semua inspirasi masyarakat Indonesia dapat terwadahi dan disalurkan dengan melaksanakan berbagai kegiatan dalam segenap aspek pembangunan nasionalnya dalam rangka mengejar tujuan nasionalnya.

c. Sebagai suatu ideologi, Pancasila merupakan ideologi yang "Terbuka" yang berkembang bersama-sama dinamika kehidupan masyarakat Indonesia yang selalu berinteraksi dengan berbagai ragam dan corak kehidupan bangsa-bangsa dunia. Dengan keterbukaannya itu Pancasila sebagai ideologi menjadi kenyal dan kuat dan bertahan sepanjang masa, sebab dengan keterbukaannya sangat memungkinkan pengembangan nilai-nilai praksis tanpa harus merubah nilai-nilai dasar yang merupakan nilai-nilai luhur yang hakiki. Oleh karenanya segala upaya telah ditempuh oleh bangsa Indonesia untuk mewujudkan

ketahanan ideologi dengan terus memperhatikan dinamika kehidupan masyarakat tanpa menghilangkan jati diri dan kepribadian bangsa. Pada dasarnya Pancasila merupakan suatu filsafat kemanusiaan yang nilai-nilai luhurnya tercermin dalam sila-sila Pancasila yang harus dan akan dipertahankan sepanjang masa meliputi nilai-nilai sebagai berikut :

- 1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, mengandung nilai-nilai tertinggi dari semua sila-sila yang lainnya. Nilai yang terkandung tersebut tidak indentik dengan agama namun berkaitan dengan ajaran semua agama serta berfungsi sebagai pemersatu kehidupan antar umat beragama yang menciptakan keimanan mental dan spiritual di dalam mendukung terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2) Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dijiwai oleh nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Di dalam nilai kemanusiaan yang adil dan beradab terkandung cita-cita kemanusiaan yang memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan paling sempurna, yang harus menjamin terwujudnya sikap toleransi, tolong-menolong, hormat menghormati, dan jiwa gotong-royong.
- 3) Sila Persatuan Indonesia, mengandung nilai-nilai persatuan dalam menjamin hidup dalam kelangsungan hidupnya, yang mengikat dan menjamin persatuan bangsa Indonesia dengan segala kemajemukannya baik bersifat persatuan spiritual maupun kebersamaan dalam kehidupan menghadapi suka dan duka. Atas hal tersebut maka muncullah suatu keinginan dan tekad serta hasrat yang kuat untuk selalu bersatu sebagai bangsa Indonesia yang hidup dan mendiami wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang di khatulistiwa dari Sabang sampai Merauku.

4) Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, menyiratkan nilai kerakyatan yang dijelmakan oleh persatuan yang riil dan wajar dimana kedaulatan rakyat berada ditangan rakyat atas dasar musyawarah dan mufakat. Demokrasi dilaksanakan berdasarkan hukum dan harus mewujudkan ketertiban sosial. Oleh karenanya perlu diciptakan adanya keseimbangan di dalam implementasi demokratisasi maupun penegakan hukum untuk memberikan landasan demokrasi, dengan mengedepankan setiap masalah untuk diselesaikan secara musyawarah guna mendapatkan mufakat.

5) Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengandung nilai-nilai keadilan sosial yang menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia yang adil dan merata.

Jelas disini Pancasila merupakan sistem nilai yang mencakup segenap nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menuntut adanya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan yang memerlukan penyelesaian.

3. Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Landasan Konstitusional

a. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis yang merupakan sebagian dari hukum dasar dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaannya sebagaimana bunyi penjelasan UUD 1945 yang meliputi :

1) "Negara" yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas

c) Hal-hal yang mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

2) Pasal 27

a) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

b) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

c) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

3) Pasal 30

a) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

b) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

c) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

d) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

e) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan

kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

4. Wawasan Nusantara Sebagai Landasan Visional

- a. Upaya suatu bangsa di dalam membina rasa kebangsaan dan menyelenggarakan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi tata negara (sistem pembinaan negara dan bangsa) maupun tata budaya (sistem pembinaan budi pekerti masyarakat bangsa) ataupun tata hukum (sistem pembinaan hukum dan perundang-undangan), adalah merupakan cerminan dari wawasan nasionalnya. Bagi bangsa Indonesia pemikiran tentang wawasan nasional sangat penting bagi setiap upaya mengembangkan konsepsi Ketahanan Nasional. Wawasan nasional atau wawasan kebangsaan Indonesia adalah Wawasan Nusantara ini merupakan konsepsi cara pandang bangsa Indonesia yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya yang didasarkan pada falsafah dan ideologi Pancasila serta sejarah dan lingkungan alam nusantara.
- b. Dihadapkan dengan berbagai kendala yang muncul dari heterogenitas bangsa dan negara maka dirumuskan wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Pada intinya wawasan nusantara mengisyaratkan perwujudan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam sebagai suatu kesatuan yang utuh.

5. Ketahanan Nasional Sebagai Landasan Konsepsional

- a. Setiap bangsa menyadari bahwa untuk dapat mencapai cita-cita luhur sebagai perwujudan dari tujuan nasionalnya harus melaksanakan usaha-usaha dalam wujud pembangunan nasionalnya pada segenap

aspek kehidupan. Namun demikian adalah suatu kenyataan bahwa usaha pencapaian tujuan nasional setiap saat akan dihadapkan pada adanya tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan yang senantiasa perlu dihadapi atau ditanggulangi. Untuk melaksanakan hal itu diperlukan kemampuan, kekuatan, ketangguhan, dan keuletan yang senantiasa dibina secara terus menerus guna mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hal inilah yang disebut Ketahanan Nasional, yang setiap saat harus dikembangkan dan ditingkatkan seiring dengan dinamika pengaruh perkembangan lingkungan strategis.

b. Pengertian Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar ataupun yang datang dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integrasi, identitas kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional.

c. Pada hakikatnya Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan, berisi kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa (termasuk bangsa Indonesia) untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan Nasional yang tangguh akan mampu memberikan dorongan terwujudnya hasil-hasil pembangunan nasional, sebaliknya keberhasilan Pembangunan Nasional akan lebih memantapkan Ketahanan Nasional. Untuk ini diperlukan konsepsi Ketahanan Nasional yaitu konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan serta keamanan yang seimbang, serasi dan selaras di seluruh aspek kehidupan nasional yang dijadikan sebagai landasan konsepsional.

6. **Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai landasan Operasional**

- a. Sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 3 Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Garis-Garis Besar Haluan daripada Negara. Garis-Garis Besar Haluan daripada Negara adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besarnya, sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat setiap 5 tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
- b. Garis-Garis Besar Haluan Negara ditetapkan dengan maksud memberikan arah penyelenggaraan negara dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berkehendak mulia, bebas, maju dan sejahtera untuk kurun waktu lima tahun mendatang.
- c. Garis-Garis Besar Haluan Negara memuat konsepsi penyelenggaraan negara yang menyeluruh untuk membangun tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mewujudkan kemajuan di segala bidang yang menempatkan Indonesia sederajat dengan bangsa lain di dunia. Untuk masa tahun 1999-2004 Garis-Garis Besar Haluan Negara tersebut oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia diputuskan sebagai Ketetapan MPR RI tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004. Sesuai dengan pasal 4 Tap MPR tersebut, MPR menugaskan Presiden RI selaku Kepala Pemerintahan Negara dan menugaskan lembaga-lembaga tinggi lainnya untuk melaksanakan ketetapan sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaannya setiap tahun sidang tahunan MPR RI.

Perihal rasa kebangsaan di dalam GBHN 1999-2004 secara eksplisit tidak dibicarakan secara khusus. Di dalam arah kebijakan bidang Politik Dalam Negeri pada salah satu butirnya (IV c 1a) dirumuskan arah kebijakan politik dalam negeri adalah "memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada Ke-bhinneka Tunggal Ika-an. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu upaya rekonsiliasi nasional yang diatur dengan Undang-Undang". Dilanjutkan pada butir berikutnya (butir 1b) "Menyempurnakan UUD 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat Pembukaan UUD 1945".



BAB – III

KONDISI KESADARAN KEBANGSAAN INDONESIA DEWASA INI DAN PERMASALAHANNYA

1. Umum

Mempelajari bangsa yang sangat majemuk seperti Indonesia tidak terlepas dari segenap aspek yang ada dalam tatanan kehidupan masyarakatnya yang sangat dipengaruhi oleh kesadaran warga negaranya sebagai suatu bangsa yang berdaulat atas suatu negara yang sah secara hukum internasional, namun juga harus memperhatikan sejarah panjang yang melatar belakanginya. Kesadaran warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tercermin dari kehidupannya dewasa ini, tidak dapat dilepaskan dari sejarah masa lalunya. Dalam sejarah itulah akan tampak semua permasalahan yang diwarnai pasang surutnya kejayaan suatu bangsa atau negara seperti juga Indonesia. Segala macam konflik-konflik kepentingan yang terjadi di masa lalu, baik disebabkan konflik internal ataupun adanya pengaruh negara asing, yang pernah terjadi ataupun yang sedang berlangsung saat ini, semuanya akan menjadi potret tentang kesadaran warga negara Indonesia di dalam mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Kesadaran Kebangsaan Indonesia

a. Masa Kerajaan Nusantara

Kehidupan masyarakat Indonesia ditinjau dari kesadarannya sebagai warga negara di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak dapat dilepaskan dari sejarah masa lalunya. Bangsa Indonesia jauh sebelum masa pra kemerdekaan (sebelum bernama Indonesia yang mendiami suatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia) merupakan kumpulan bangsa-bangsa yang mendiami suatu wilayah kerajaan-kerajaan besar Nusantara yang pernah berkuasa di kawasan

Asia Tenggara. Secara umum kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat itu adalah sebagai berikut :

1) Masa Kerajaan Sriwijaya

Kerajaan nusantara pertama yang pernah menguasai wilayah kepulauan nusantara adalah kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini masa kejayaannya berlangsung antara abad XI sampai dengan abad XIII, merupakan kerajaan yang sangat dikenal sebagai pusat agama Budha di kawasan Asia Tenggara. Hal ini terbukti dari catatan sejarah akan adanya perguruan tinggi agama Budha "Nalanda" yang menjadi tempat menimba ilmu umat Budha pada waktu itu. Wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya cukup besar yaitu meliputi sebagian besar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang, wilayah Filipina Selatan, sebagian wilayah Indo China dan Semenanjung Malaka. Dasar-dasar negara modern seperti sekarang belum ada, namun lebih ditekankan kepada penguasaan wilayah sebagai dasar keinginan kehidupan bernegara, sehingga rasa kebangsaannya pun pada saat itu belum terkristal yang dapat menjadi suatu fundamen yang kuat sebagai suatu bentuk bangsa dan negara yang merupakan hasil integrasi. Sejalan dengan perkembangan sejarah kerajaan-kerajaan di wilayah nusantara lainnya seperti Singosari dan Majapahit, maka pengaruh Sriwijaya pun semakin surut dan pada akhirnya tenggelam.

2) Masa Kerajaan Majapahit

Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan nusantara yang kedua yang pernah berkuasa di wilayah nusantara pada abad XIII sampai abad XVI, dengan wilayah kekuasaan yang lebih besar dari kerajaan Sriwijaya. Wilayah kekuasaannya meliputi seluruh wilayah nusantara, sebagian Indo China, Filipina Selatar, Semenanjung

Malaka sampai Madagaskar. Kekuasaan yang besar itu didukung oleh adanya armada angkatan laut yang besar dan kuat. Hampir sama dengan Kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit membangun persatuan dan kesatuan negaranya atas dasar "Sesanti" dari Mpu Tantular yaitu "Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrva". Sesanti inilah yang kemudian hari oleh para "Founding Fathers" diangkat menjadi sesanti dan dasar negara Republik Indonesia "Pancasila", yang berbunyi "Bhinneka Tunggal Ika". Seperti halnya kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit runtuh juga. Keruntuhannya lebih banyak disebabkan oleh perebutan kekuasaan yang terus menerus setelah berlalunya masa keemasan pada pemerintahan Prabu Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada yang sangat terkenal. Di samping itu juga kerajaan Majapahit mulai terdesak oleh perkembangan kerajaan-kerajaan Islam yang mulai bermunculan seperti Demak dan Banten serta Mataram. Kerajaan Demak sebagai penerus kerajaan Majapahit tidak dapat menguasai wilayah-wilayah nusantara karena pada saat itu mulai berdatangan bangsa kulit putih/Belanda yang mulai menguasai wilayah Nusantara secara bertahap.

b. Masa Pra Kemerdekaan

Pada masa ini merupakan masa-masa yang sulit bagi seluruh bangsa di wilayah Nusantara, karena kehidupannya di dalam kekuasaan bangsa barat/kulit putih yang dengan kelebihan ilmu pengetahuan dan persenjataan yang dimilikinya telah menjajah seluruh bangsa di wilayah nusantara selama kurun waktu hampir 3,5 abad, termasuk kehidupan di dalam penjajahan bangsa Jepang selama 3,5 tahun. Kehidupan bangsa Indonesia pada masa-masa ini secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Masa Penjajahan Belanda (Pra Kebangkitan Nasional)

Setelah berlalunya kejayaan kerajaan-kerajaan nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit, kerajaan-kerajaan kecil mulai tumbuh dan berkembang di seluruh wilayah nusantara. Kedatangan bangsa kulit putih dengan persenjataan yang lebih modern dan bekal ilmu pengetahuan yang lebih maju secara perlahan-lahan telah merebut dan menjadikan wilayah-wilayah nusantara sebagai daerah jajahannya. Pada pertengahan abad XVI VOC Belanda yang sebenarnya lebih merupakan suatu organisasi perdagangan, pada akhirnya mampu memanfaatkan kondisi kelemahan bangsa-bangsa di kerajaan-kerajaan nusantara melalui politik "Devide Et Impera" menaklukkan seluruh wilayah nusantara dalam wilayah kekuasaannya yang kemudian disebut Hindia Belanda. Selama kurang lebih 350 tahun kita dapat memperhatikan dalam sejarah bahwa politik tersebut merupakan politik adu domba/pecah belah yang sangat ampuh menaklukkan kerajaan-kerajaan di wilayah nusantara pada waktu itu. Banyak bangsa Indonesia menjadi tentara/kaki tangan kaum penjajah dan kemudian memerangi bangsanya sendiri.

2) Masa Kebangkitan Nasional

Sejalan dengan perkembangan kehidupan bangsa-bangsa, pergerakan nasional di negara-negara jajahan bermunculan dan didorong oleh kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Di Indonesia pergerakan nasional dimulai dengan gerakan-gerakan untuk melepaskan diri dari penjajahan di seluruh tanah air dan terorganisir dengan didirikannya organisasi Boedi Oetomo oleh Dr. Wahidin Sudiro Husodo pada tahun 1908, yang diikuti oleh organisasi pergerakan lainnya seperti Syarekat Islam, Muhammadiyah, Partai Nasional Indonesia dan sebagainya.

Gerakan-gerakan nasional itulah yang pada akhirnya mendorong munculnya semangat kebangsaan yang ditandai dengan Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang melahirkan "Sumpah Pemuda" dengan semboyan Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa. Konggres dari para pemuda berbagai suku bangsa di wilayah Hindia Belanda itulah yang merupakan awal dari keinginan untuk suatu rasa persatuan kebangsaan melawan penjajahan untuk menuntut kemerdekaan Indonesia.

3) Masa Penjajahan Jepang

Perang dunia kedua yang pecah di Asia Pasifik antara Jepang melawan Sekutu merupakan titik awal runtuhnya hegemoni Belanda di wilayah Hindia Belanda, dimana pada tahun 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Kekuasaan Jepang hanya berlangsung 3,5 tahun karena Jepang terdesak oleh Sekutu. Namun pada masa penjajahan Jepang yang singkat itu justru telah memberikan kesempatan Indonesia untuk merdeka. Janji kemerdekaan oleh Jepang sebenarnya lebih ditujukan agar Indonesia nantinya memihak Jepang. Salah satu dari upaya Jepang adalah dengan membentuk kesatuan-kesatuan militer dari pribumi dan salah satunya yang terkenal adalah "PETA" (Pembela Tanah Air). Sejarah mencatat pemberontakan Peta di Blitar yang dipimpin oleh Shodanco Slamet Supriyadi. Pemberontakan ini gagal disebabkan tidak mendapatnya dukungan dari kesatuan-kesatuan PETA di daerah-daerah lainnya dan pada saat itu Jepang masih sangat kuat. Pada akhirnya pemberontakan berhasil dipadamkan dan banyak tokoh-tokohnya yang dihukum mati.

c. Masa Paska Kemerdekaan

1) Masa Perang Mempertahankan Kemerdekaan

Pada masa ini masih terjadi perang, yaitu perang dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlangsung pada tahun 1945-1949, yang sekaligus membuktikan bahwa dengan bersatu padu, bangsa Indonesia telah berhasil mempertahankan kemerdekaannya serta mendapat pengakuan atas kedaulatannya oleh dunia internasional. Dengan semboyan "Merdeka atau Mati" telah mampu membakar semangat kebangsaan dari seluruh warga Indonesia untuk mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Meskipun demikian perang suci yang telah dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan lebih sempat dinodai oleh adanya pemberontakan komunisme/PKI pada tahun 1948, dipimpin Muso yang bermaksud mengkomunikasikan Indonesia, namun seruan Presiden Sukarno kepada bangsa Indonesia untuk memilih "ikut Sukarno atau Muso" telah mampu mendorong rakyat untuk bersama-sama TNI menghancurkan pemberontakan tersebut. Dengan demikian maka Negara Kesatuan Republik Indonesia terhindar dari pengaruh marxisme komunisme. Selanjutnya bangsa Indonesia masih harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan.

2) Masa Pemerintahan Presiden Sukarno (Orde Lama)

Akhirnya melalui perundingan Roem Royen telah dicapai suatu pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda. Namun dalam perundingan tersebut Indonesia telah diakui dalam bentuknya sebagai negara federal yaitu Republik Indonesia Serikat. Tujuan Belanda adalah agar Indonesia tidak berintegrasi dalam bentuk negara kesatuan sehingga dengan demikian Belanda tetap memiliki kesempatan untuk menanamkan pengaruhnya di

Indonesia. Namun kemudian Indonesia secara sepihak mengembalikan bentuk negara sebagai negara kesatuan yang menganut demokrasi parlementer model Eropa Barat. Selama berlangsungnya pemerintahan dengan sistem demokrasi liberal telah muncul kelompok-kelompok separatis yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah pusat. Pemberontakan-pemberontakan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Pemberontakan DI/TII

Pemberontakan ini bertujuan untuk mendirikan "Negara Islam Indonesia" dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Karto Suwiryo yang beroperasi di wilayah Jawa Barat, Moch. Mahfud Abdul Rachman di Jawa Tengah, di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar serta di Aceh yang dipimpin oleh Daud Beureuh. Atas inisiatif Kolonel M. Yasin sebagai Pangdam I pemberontakan di Aceh dapat diakhiri dengan cara musyawarah setelah diadakan pendekatan melalui tokoh-tokoh daerah. Sedangkan pemberontakan yang lainnya akhirnya dapat dihancurkan.

b) Pemberontakan APRA

Pada bulan Januari 1950 telah terjadi teror oleh APRA (Angkatan perang Ratu Adil) yang dipimpin oleh Kapten Westerling. Gerakan ini telah mengajukan tuntutan kepada pemerintah RIS dan negara Pasundan agar APRA diakui sebagai Tentara Pasundan dan menolak untuk dibubarkannya negara Pasundan tersebut. Pada akhirnya diketahui bahwa gerakan tersebut merupakan rencana dari Sultan Hamid II untuk menangkap dan membunuh beberapa Menteri, namun akhirnya Sultan Hamid II dapat ditangkap dan Westerling melarikan diri ke luar negeri.

c) Pemberontakan Andi Azis

Pemberontakan Andi Azis di Sulawesi Selatan ini terjadi akibat Andi Azis terdesak kedudukannya. Sebagaimana diketahui bahwa Andi Azis adalah Komandan Kompi Pasukan KNIL yang pada saat itu harus dilebur ke dalam APRIS. Pada bulan Agustus 1950 pemberontakan ini akhirnya dapat dihentikan setelah Andi Azis menyerah.

d) Pemberontakan RMS

Pemberontakan ini dipimpin oleh Dr. Soumokil yang memproklamkan berdirinya "Republik Maluku Selatan" yang mendapat dukungan dari Belanda. Namun akhirnya pemberontakan ini dapat ditumpas dan banyak tokoh-tokohnya melarikan diri ke negeri Belanda. Dr. Soumokil sendiri akhirnya tertangkap pada tanggal 2 Desember 1963.

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka berlaku demokrasi terpimpin selama masa pemerintahan Presiden Sukarno. Pada masa ini kepemimpinan Presiden Sukarno lebih menitik beratkan kepada pembangunan bidang politik di mana pada saat itu Presiden Sukarno dengan konsep "NASAKOM"-nya bermaksud mempersatukan seluruh kekuatan politik yang ada di Indonesia. Namun hal tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh PKI untuk menggagalkan kekuatannya. Pada saat itu terjadi dua kubu yang saling berhadapan yaitu PKI di satu sisi serta kelompok TNI AD yang anti komunis di sisi lainnya. Secara umum kehidupan politik pada saat itu telah menimbulkan keretakan dari persatuan bangsa Indonesia karena adanya persaingan dari kelompok-kelompok komunis, nasionalis dan agama. Puncak dari keretakan bangsa Indonesia adalah ketika timbul pemberontakan PKI dengan G.30.S-nya yang mengadakan kudeta berdarah yaitu dengan

menculik dan membunuh para Jenderal TNI AD yang dianggap kontra revolusioner. Kudeta tersebut akhirnya dapat dipatahkan oleh Mayor Jenderal Suharto yang kemudian berhasil menangkap tokoh-tokoh G.30.S PKI dan mengajukannya ke Mahmilub. Suatu hal yang terbukti pada saat itu adalah bahwa masyarakat Indonesia tidak menghendaki berkembangnya komunisme.

Hal lain yang cukup menonjol pada masa itu sebelumnya adalah keberhasilan Indonesia untuk memaksa Belanda mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia pada tahun 1963. Operasi Mandala yang dilancarkan oleh Indonesia telah memaksa Amerika Serikat meyakinkan pihak Belanda untuk duduk di dalam perundingan dengan Indonesia karena Indonesia bersungguh-sungguh akan merebut Irian Barat dengan kekuatan senjata. Pada masa itu kemudian Indonesia juga terlibat konflik dengan Malaysia yang didukung oleh Inggris karena Indonesia menganggap bahwa Malaysia merupakan negara boneka yang dibentuk oleh Inggris untuk mengepung Indonesia. Konfrontasi dengan Malaysia ini berakhir di meja perundingan seiring dengan berubahnya situasi politik di dalam negeri Indonesia yang menghendaki pemulihan hubungan/perdamaian dengan Malaysia.

Suatu hal yang nyata dari situasi politik saat itu bahwa masyarakat Indonesia menghendaki keutuhan wilayah kedaulatan Indonesia dengan mendukung kebijaksanaan politik Presiden Sukarno. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa persaingan paham/ideologi telah menyeret Indonesia ke dalam perpecahan

3) Masa Pemerintahan Presiden Suharto (Orde Baru)

Setelah berakhirnya era Orde Lama bangsa Indonesia beralih kepada masa kepemimpinan Orde Baru yang orientasinya mulai menitik beratkan pada pembangunan nasional dalam rangka mengisi kemerdekaan, di bawah kepemimpinan Presiden Suharto

yang berlangsung selama 32 tahun. Secara umum kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilihat dari penanganan segenap aspek kehidupan yang telah terjadi pada masa itu.

a) Ideologi

Setelah berhasil menghancurkan pemberontakan G.30.S PKI seluruh bangsa Indonesia dengan kepeloporan Orde Baru telah menempatkan Pancasila dan UUD 1945 pada posisi yang tidak dapat ditawar yaitu harus dilaksanakannya Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Tekad tersebut diwujudkan di dalam ketetapan MPRS/XX/1966. Partai Komunis Indonesia beserta seluruh ajaran Marxisme/Komunisme dinyatakan sebagai partai dan faham yang terlarang. Hal ini dikukuhnya dengan ketetapan MPRS nomor : MPRS/XXV/1966 pada masa pemerintahan orde baru ini Pancasila akhirnya ditetapkan sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui ketetapan MPR nomor : MPR/III/1978.

b) Politik

Selama 32 tahun masa orde baru, kehidupan politik di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Golkar yang secara terus menerus setiap 5 tahun memenangkan Pemilu secara mayoritas. Tak dapat dipungkiri bahwa kebesaran Golkar pada saat itu juga karena atas dukungan/keberpihakan TNI dan Pegawai Negeri Sipil kepada Golkar. Kekuasaan Golkar pada saat itu sedemikian besarnya meliputi seluruh birokrasi dalam pemerintahan. Praktis pada waktu itu tidak ada demokrasi karena siapapun yang bernada vokal pasti akan "disingkirkan" dan dicap anti kemapanan. Dapat dikatakan pada masa itu arti demokrasi

Pancasila telah diselewengkan menjadi suatu sistem politik yang mendukung pemerintahan yang otoriter. Dari kondisi seperti itu Golkar menjadi semakin dominan keberadaannya dan menjadi mayoritas tunggal. Kekuasaan Ketua Dewan Pembina Golkar lebih besar dari Ketua Golkar sendiri di dalam penentuan kebijaksanaan organisasi dan tak dapat dipungkiri bahwa pada waktu itu TNI telah menjadi alat politik dan alat kekuasaan. Partai-partai politik lainnya seperti PPP dan PDI tidak mampu menjadi kekuatan yang dapat mengontrol pemerintah, karena semua pimpinannya terkesan harus mendapat "restu" dari penguasa.

c) Ekonomi

Pada masa orde baru sebenarnya Indonesia telah mengalami kemajuan di bidang ekonomi yang cukup menggembirakan. Indonesia sebagai negara pengimpor beras terbesar menjadi negara yang mampu berswasembada beras. Pertumbuhan ekonomi pada saat itu mencapai 7-8% pertahun dan income perkapita mencapai 2000 US dollar pertahun. Namun demikian adalah kenyataan bahwa sistem ekonomi yang ada pada saat itu lebih memberi peluang kepada para konglomerat ketimbang pertumbuhan koperasi atau ekonomi rakyat. Kedekatan para konglomerat dengan para penguasa telah menyuburkan praktek-praktek KKN sehingga ketika terjadi krisis moneter yang melanda Indonesia, maka para konglomerat berjatuh karena tidak mampu membayar hutang yang diakibatkan dari jatuhnya nilai Rupiah yang mencapai Rp.16.000,- per USD 1.00. Hal tersebut akhirnya membuat perekonomian Indonesia ambruk. Kondisi ini telah memicu gerakan mahasiswa yang tidak puas terhadap keadaan yang ada,

melakukan demo-demo anti pemerintah dan menuntut diadakannya reformasi serta meminta Presiden Suharto mengundurkan diri. Kondisi politik Indonesia pada waktu itu mencapai puncaknya dengan lengsernya Presiden Suharto dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie.

d) Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru meskipun tidak terjadi permasalahan yang dapat mengundang perhatian dunia luar namun di sana-sini memang masih terdapat permasalahan-permasalahan SARA di daerah-daerah tertentu, akan tetapi berkat kesigapan aparat serta perhatian yang besar dari pemerintah, permasalahan-permasalahan tersebut dapat diredam sehingga tidak memberikan dampak negatif yang lebih besar bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

e) Hankam

Permasalahan yang dihadapi di bidang Hankam oleh pemerintah Orde Baru adalah adanya gerakan separatisme di Timor Timur, Aceh dan Irian Jaya. Meskipun gerakan-gerakan separatisme itu mendapat dukungan dari pihak luar negeri namun pemerintah dengan dukungan masyarakat Indonesia masih mampu mengendalikan kondisi yang ada sehingga gerakan separatisme tersebut masih bisa dihadapi dan tidak meluas. Pada saat itu secara umum kepercayaan masyarakat kepada peran TNI cukup besar dan TNI memiliki ruang gerak yang cukup untuk mengendalikan setiap keadaan.

4) Masa Reformasi

Setelah lengsernya Presiden Suharto maka praktis kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun berakhir. Selanjutnya Indonesia memasuki masa transisi di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie yang kemudian melalui Pemilu yang lebih JURDIL dan Demokratis tahun 1999, telah dipilih GUS DUR sebagai Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai tahun 2004. Kesadaran akan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa reformasi dapat dilihat dari segenap aspek kehidupan yang terjadi pada masa kini, antara lain :

a) Ideologi

Pancasila yang semula merupakan satu-satunya azas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lagi menjadi keharusan dengan dicabutnya TAP MPR Nomor : II/MPR/1978. Hal ini memungkinkan partai-partai politik tidak harus menggunakan azas Pancasila. Penataran Pancasila yang semula ditujukan untuk tujuan persatuan dan kesatuan ditiadakan berkaitan dengan dibubarkannya BP7 dan dimasukkannya pelajaran tentang Pancasila ke dalam pelajaran kewarganegaraan di sekolah-sekolah/ perguruan tinggi. Pada era kepemimpinan Presiden Gus Dur, telah dinyatakan pemikiran beliau untuk mencabut Tap Nomor : XXV/MPRS/1966 tentang Pelarangan Partai Komunis Indonesia beserta ajaran Komunisme/Marxisme, telah memungkinkan masyarakat/generasi muda, pelajar dan mahasiswa untuk secara bebas mempelajari faham-faham yang sebenarnya pada Orde Baru telah dilarang seperti faham marxisme/komunisme sebagai akibat dari maraknya penerbitan buku-buku marxisme/komunisme maupun tokoh-tokoh yang mempunyai latar belakang faham tersebut.

b) Politik

Era pemerintahan Presiden B.J. telah mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan dilaksanakannya demokrasi di Indonesia meskipun di dalam implementasinya demokrasi tersebut telah diartikan telah terlalu jauh dan lebih kepada pemahaman berdasarkan pemikiran barat yang lebih menekankan kepada kebebasan individu. Pada masa Presiden B.J. Habibie telah lahir lebih dari 100 partai politik baru, namun hanya 48 diantaranya yang memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti pemilihan umum pada bulan Juni 1999. Kesalahan politik yang paling fatal dari pemerintahan B.J. Habibie adalah ketika memberikan dua opsi kepada Timor Timur antara memilih merdeka atau otonomi seluas-luasnya kepada rakyat Timor-Timur, menyebabkan Timor Timur terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Pemilu yang diadakan pada bulan Juni 1999 Golkar yang biasanya menjadi pemenang dengan suara mayoritas ternyata dikalahkan oleh PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati yang meraih 35% suara. Dengan adanya sistem perwakilan di MPR melalui pemilihan Presiden yang sangat demokratis Gus Dur terpilih menjadi Presiden sedangkan Megawati hanya terpilih sebagai Wakil Presiden. Hal tersebut tidak terlepas dari keberhasilan politik "Poros Tengah" yang dipimpin oleh Amien Rais yang berhasil menarik suara Golkar ke kubu Poros Tengah. Kondisi selanjutnya dari masa kepemimpinan Presiden Gus Dur lebih diwarnai adanya konflik-konflik politik dari para elit politik baik dari pemerintah, lembaga legislatif, lembaga yudikatif maupun para pengamat politik yang pada akhirnya menyebabkan konflik-konflik politik yang berdampak kepada sektor ekonomi, sosial dan keamanan.

Kebebasan pers dewasa ini juga sering dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan politik, sehingga pemberitaan-pemberitaan di media cetak maupun dialog-dialog politik di media elektronik sering tidak proporsional dan pendapat-pendapat para tokohnya pada umumnya sangat subyektif. Hal tersebut secara positif telah menambah pendewasaan kehidupan politik masyarakat namun di sisi lain telah memprovokasi masyarakat untuk berbuat mengikuti kepentingan elit politiknya. Sudah barang tentu hal ini menjadi faktor pemicu konflik yang berdampak luas terhadap integritas nasional.

c) Ekonomi

Masa kepemimpinan Presiden B.J.Habibie yang hanya berlangsung lebih dari 1 tahun sebenarnya secara perlahan-lahan telah berhasil menurunkan tingkat krisis ekonomi yang terjadi di mana kurs Rupiah yang semula mencapai Rp.16.000,00 per USD. 1.00 menjadi Rp.6.800,00 – 7.000,00 per USD 1.00, namun pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur karena adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan Presiden yang tidak sejalan dengan parlemen sering menimbulkan konflik-konflik politik, sebagaimana diuraikan di atas yang telah memunculkan sentimen pasar dan akibatnya terjadi merosotnya nilai tukar Rupiah kembali dikisaran Rp.8.500,00 – Rp.9.500,00 per USD 1.00. Kondisi politik di Indonesia telah menimbulkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah baik dari luar maupun dalam negeri, apakah pemerintah mampu membawa keluar bangsa Indonesia dari krisis ekonomi yang dihadapi.

d) Sosial Budaya

Permasalahan bidang sosial budaya yang paling berat dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah yang menyangkut masalah SARA. Konflik-konflik yang terjadi di Ambon/Maluku, Poso, Mataram, dan di daerah-daerah lainnya termasuk di ibukota menunjukkan bahwa terhadap masalah SARA ini bangsa Indonesia sangat rawan terhadap kecenderungan terjadi disintegrasi. Di samping kasus-kasus antar etnis dan agama bangsa Indonesia juga sangat rentan di dalam kehidupan generasi mudanya mauun masyarakatnya terhadap permasalahan-permasalahan sosial seperti tawuran antar pelajar dan tawuran antar kampung. Bahkan yang amat menyedihkan adalah tidak berdayanya aparat penegak hukum untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi yang disebabkan masyarakat tidak ada keseganan kepada hukum yang berlaku. Banyak kasus-kasus penghakiman oleh massa yang brutal yang membawa korban tanpa melalui pengadilan. Kondisi semacam ini tidak terlepas dari aparat penegak hukum yang serba ragu di dalam menghadapi amuk massa/pelanggaran hukum karena belum ada kepastian hukum yang digunakan untuk bertindak dengan tegas. Masalah lain yang dihadapi bangsa Indonesia selain SARA adalah peredaran Narkoba di semua lapisan masyarakat baik generasi muda, pegawai, kaum selebritis bahkan juga aparat Kepolisian dan TNI. Permasalahan Narkoba ini sangat sulit diberantas karena mempunyai jaringan internasional serta dukungan dana yang besar.

e) Hankam

Secara umum kondisi keamanan di Indonesia tidak menggembirakan sebagaimana yang terlihat pada permasalahan-permasalahan yang ada sampai saat ini masih memerlukan waktu penyelesaiannya. Hal ini dapat diketahui bersama dari situasi keamanan dalam negeri seperti di bawah ini :

(1) Konflik Ambon/Maluku sampai saat ini telah sampai pada tahapan diberlakukannya darurat sipil. Tidak tertutup kemungkinan akan menjadi darurat militer apabila keadaan tidak kunjung membaik. Berdasarkan informasi yang ada sebenarnya masyarakat Maluku pada umumnya ingin segera berdamai, namun adanya provokator seringkali konflik-konflik dipicu kembali.

(2) Jeda kemanusiaan di Aceh masih ditandai dengan jatuhnya korban di pihak aparat dan juga dari pihak GAM, sehingga jeda kemanusiaan ini diusulkan untuk diperpanjang dan dicari solusi yang terbaik untuk menghentikan pertikaian antara GAM dengan aparat karena sebenarnya masyarakat Aceh sebagian besar sudah menginginkan untuk mengakhiri konflik.

(3) Kondisi sosial masyarakat sebagai akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan telah menyebabkan banyaknya pengangguran sebagai korban PHK serta meningkatnya pelanggaran kriminalitas.

Dilihat dari keseluruhan kondisi keamanan sebagaimana diuraikan di atas, maka hal tersebut merupakan

gambaran nyata dari kondisi kehidupan Hankam yang belum adanya kesadaran berbangsa dan bernegara dari anak bangsa. Belum nampak adanya rasa cinta Tanah Air, bangga sebagai Bangsa Indonesia dan kerelaan berkorban untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Permasalahannya

Dalam sepuluh tahun terakhir ada dua peristiwa dan realitas besar di negeri ini. Pertama bangsa Indonesia mengalami krisis nasional yang luas dan seperti kita ketahui, yang semula krisis ini berupa krisis moneter, akhirnya meluas menjadi krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial dan krisis kepercayaan yang saling kait mengkait satu sama lain.

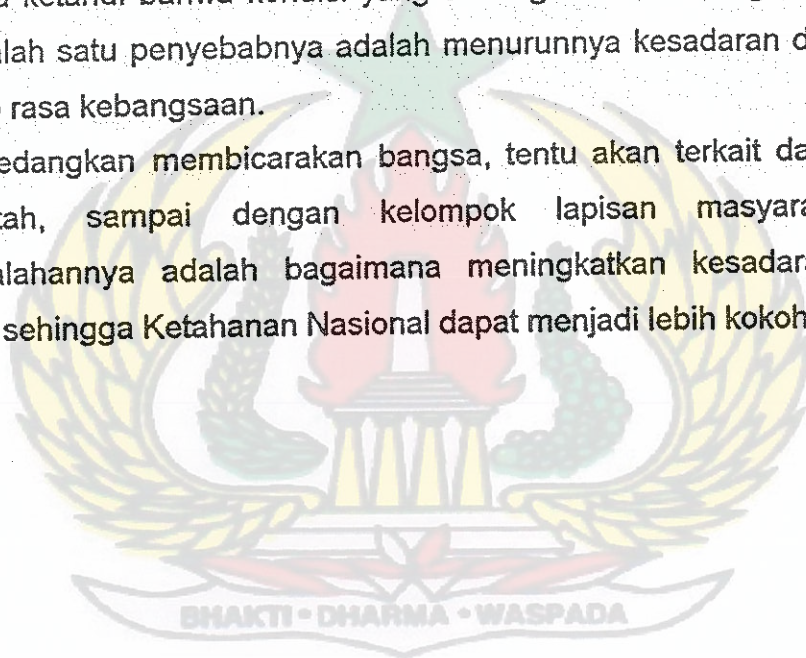
Kedua, jika secara kondisional bangsa Indonesia terjatuh dalam krisis, dalam tataran intelektual, politis dan ideologis muncul gerakan pencerahan, pembebasan dan dalam batas-batas tertentu perlawanan. Seraya menyalahkan pemerintah dan tatanan masa lalu, tumbuh gerakan yang amat kuat untuk melakukan perubahan dan pembaharuan pada hampir seluruh bidang kehidupan bangsa. Gerakan nasional inilah yang selanjutnya kita kenal dengan nama reformasi.

Era reformasi ini telah membawa pengaruh yang sangat mendasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari pemerintahan sehari-hari baik dari media cetak maupun media elektronik, telah tergambar situasi dan kondisi bangsa kita yang sedang sakit. Hal ini semua tercermin dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta kondisi Hankam bangsa ini. Keadaan dan kondisi ini diperparah, dengan adanya statemen-statemen politik dari para elit, yang tidak mencarikan solusi pemecahan masalah bangsa, tetapi lebih banyak bagaimana memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelompok maupun pribadi. Di sisi lain statemen-statemen tersebut membuat kebingungan masyarakat serta sering mendorong dan memanasakan masyarakat untuk berbuat menyimpang dari koridor serta melanggar pranata-pranata sosial, maupun pranata hukum yang ada.

Tuntutan desentralisasi dalam bentuk otonomi yang diperluas meskipun telah terakomodir di dalam UU No. 22 tahun 1999 serta UU No. 25 tahun 1999, namun demikian masih ada keinginan-keinginan yang secara ekstrim memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, menunjukkan betapa rawannya kondisi identitas kesadaran kebangsaan dan integritas bangsa saat ini, apabila tidak diwaspadai dan ditangani secara benar, disintegrasi bangsa pasti tidak mampu kita hindari.

Berbicara penghayatan kesadaran kebangsaan identitas dan integritas bangsa, tidak bisa tidak terkait dengan pengelompokan dalam komponen bangsa. Komponen bangsa dimaksud adalah supra struktur, infra sstruktur, sub struktur dan masyarakat sendiri. Mengapa digunakan pengelompokan seperti di atas. Kita ketahui bahwa kondisi yang sedang melanda bangsa dewasa ini, kita yakini salah satu penyebabnya adalah menurunnya kesadaran dan pemahaman terhadap rasa kebangsaan.

Sedangkan membicarakan bangsa, tentu akan terkait dari kelompok elit pemerintah, sampai dengan kelompok lapisan masyarakat terbawah. Permasalahannya adalah bagaimana meningkatkan kesadaran kebangsaan tersebut sehingga Ketahanan Nasional dapat menjadi lebih kokoh.



BAB – IV

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Umum

Kehidupan manusia dalam perkembangan peradabannya menuju kepada kemajuan, banyak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Pengaruh dari perubahan yang terjadi dapat berdampak secara positif maupun negatif pada tatanan kehidupan masyarakatnya, baik terhadap pola pikir, pola sikap maupun perilakunya.

Pengaruh yang positif akan memberikan kontribusi yang besar di dalam kehidupan masyarakat untuk membangun lingkungannya dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya di dalam berkarya membangun bangsa dan negaranya. Sedangkan pengaruh negatif dapat membuat suatu masyarakat bangsa kehilangan identitas bangsanya bahkan integrasi/kedaulatan negaranya sebagai akibat ketidakmampuannya melawan arus masuk dampak negatif dari perubahan-perubahan yang terjadi.

Dalam kondisi seperti itu, maka sangat tidak mustahil terjadinya perpecahan bangsa dan negara yang diawali dengan timbulnya konflik-konflik internal sebagai akibat perbedaan persepsi di dalam menerima perubahan-perubahan yang ada, di mana munculnya kepentingan-kepentingan kelompok, golongan, kedaerahan sebagai wujud dari primordialisme yang sempit.

Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang memiliki warga negara yang masyarakatnya sangat homogen dan ditunjang dengan kondisi geografis yang terdiri dari ribuan pulau-pulau dan kepulauan., meskipun terletak pada posisi yang strategis namun juga sangat rawan terhadap kemungkinan terjadinya disintegrasi bangsa dan negara.

2. Perkembangan Global

Perkembangan global yang telah terjadi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir telah berpengaruh terhadap kehidupan bangsa-bangsa dan negara tidak

BAB – IV

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Umum

Kehidupan manusia dalam perkembangan peradabannya menuju kepada kemajuan, banyak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Pengaruh dari perubahan yang terjadi dapat berdampak secara positif maupun negatif pada tatanan kehidupan masyarakatnya, baik terhadap pola pikir, pola sikap maupun perilakunya.

Pengaruh yang positif akan memberikan kontribusi yang besar di dalam kehidupan masyarakat untuk membangun lingkungannya dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya di dalam berkarya membangun bangsa dan negaranya. Sedangkan pengaruh negatif dapat membuat suatu masyarakat bangsa kehilangan identitas bangsanya bahkan integrasi/kedaulatan negaranya sebagai akibat ketidakmampuannya melawan arus masuk dampak negatif dari perubahan-perubahan yang terjadi.

Dalam kondisi seperti itu, maka sangat tidak mustahil terjadinya perpecahan bangsa dan negara yang diawali dengan timbulnya konflik-konflik internal sebagai akibat perbedaan persepsi di dalam menerima perubahan-perubahan yang ada, di mana munculnya kepentingan-kepentingan kelompok, golongan, kedaerahan sebagai wujud dari primordialisme yang sempit.

Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang memiliki warga negara yang masyarakatnya sangat homogen dan ditunjang dengan kondisi geografis yang terdiri dari ribuan pulau-pulau dan kepulauan., meskipun terletak pada posisi yang strategis namun juga sangat rawan terhadap kemungkinan terjadinya disintegrasi bangsa dan negara.

2. Perkembangan Global

Perkembangan global yang telah terjadi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir telah berpengaruh terhadap kehidupan bangsa-bangsa dan negara tidak

terkecuali Indonesia. Adapun perkembangan yang terjadi adalah sebagai berikut :

a. Keruntuhan Blok Timur

Dekade terakhir abad XX dunia menyaksikan runtuhnya negara-negara Eropa Timur seperti Uni Soviet, Yugoslavia, dan Cekoslovakia serta bergabungnya kembali Jerman Timur dan Jerman Barat. Bersamaan dengan runtuhnya Uni Soviet sebagai pemimpin Blok Timur, maka bubarlah sistem pemerintahan di bawah diktator proletariat dan negara-negara pecahannya menjadi negara-negara baru dengan sistem demokrasi parlementer. Keruntuhan Uni Soviet tersebut sekaligus merupakan keruntuhan Pakta Warsawa karena negara-negara yang semula bergabung dengan Pakta Warsawa meninggalkan kubu negara-negara komunis menjadi negara dengan sistem demokrasi, bahkan beberapa diantaranya masuk menjadi anggota NATO.

b. Masa Paska Perang Dingin

Berakhirnya perang dingin antara Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat, telah membawa dunia memasuki tatanan yang lebih damai, hal ini dikarenakan konflik Timur-Barat dalam bentuk persaingan ideologi, politik, konfrontasi militer dan perebutan pengaruh dalam percaturan internasional tidak lagi merupakan masalah yang mendominasi permasalahan antar bangsa-bangsa. Kondisi tersebut akhirnya membawa posisi Amerika Serikat tampil menjadi negara adidaya tunggal yang cenderung bertindak sebagai polisi dunia serta cenderung mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

c. Era Globalisasi

Di samping ditandai dengan berakhirnya perang dingin, dekade terakhir abad XX juga merasakan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan

dan teknologi, khususnya di bidang telekomunikasi dan informasi. Media elektronik seperti televisi yang sampai era tahun 1970-an masih merupakan barang mewah dan langka, sekarang telah menjadi konsumsi masyarakat lapisan bawah, yang mudah didapatkan di mana-mana ditambah lagi dengan pesatnya perkembangan sarana telekomunikasi/informasi seperti telepon selular, faksimile, e-mail, jaringan internet dan personal computer yang telah berkembang semakin canggih serta menjadi bagian dari jaringan komunikasi yang terus berkembang.

Kemajuan teknologi seperti tersebut di atas telah memungkinkan setiap individu memperoleh kemudahan informasi dari segenap penjuru dunia dengan sangat cepat. Dapat dikatakan bahwa semua permasalahan dibagian dunia yang jauh akan segera sampai di bagian dunia lainnya tanpa dapat dicegah, dan dalam waktu yang sangat singkat. Isu-isu global seperti demokratisasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup dan perdagangan bebas dengan mudahnya terserap ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa penalaran dengan nilai-nilai budaya yang telah ada. Secara umum dampak globalisasi yang tampak dalam percaturan internasional adalah sebagai berikut :

- 1) Sangat berperannya badan-badan dunia terhadap kehidupan politik internasional dan melakukan intervensi ke dalam permasalahan dalam negeri, khususnya di luar negara-negara maju, seperti PBB, Komisi Hak Asasi Manusia, Mahkamah Internasional, WTO, IMF dan sebagainya.
- 2) Penggunaan isu-isu global untuk memojokkan negara-negara berkembang/dunia ketiga untuk kemudian melakukan turut campur secara langsung kepada masalah-masalah dalam negeri bangsa-bangsa, ataupun melalui embargo ekonomi/militer, atau sanksi-sanksi PBB, di mana kepentingan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lebih berperan/dominan. Hal seperti itu telah dirasakan oleh negara-negara seperti Yugoslavia, Rusia, bahkan

juga Indonesia yaitu dengan lepasnya Timor Timur yang diduga sebagai hasil manuver negara-negara yang anti Indonesia serta konspirasi politik negara-negara tersebut melalui UNAMET.

3) Konflik internal di negara-negara dunia dengan latar belakang etnik dan agama telah mendorong berkembangnya kelompok-kelompok separatis di berbagai negara untuk memisahkan diri dari negara induknya dengan mencoba mengandalkan dukungan internasional melalui LSM/NGO.

d. Peredaran Narkoba

Organisasi yang mengandalkan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di dunia merupakan organisasi yang cukup kuat solid dan memiliki modal yang sangat besar sehingga mampu membiayai tenaga-tenaga profesional untuk mendukung organisasinya. Berdasarkan data yang ada pada tahun 1995 keuntungan industri ilegal ini mencapai 200-300 miliar dolar. Yang perlu diwaspadai adalah kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah negara-negara untuk memanfaatkan peredaran narkoba dalam membiayai kegiatannya.

e. Perkembangan LSM/NGO Internasional

Pada dewasa ini LSM/NGO telah berkembang di seluruh dunia dan kegiatannya di semua aspek kehidupan telah menjangkau secara nasional, regional dan global seperti Green Peace, Amnesty Internasional dan Human Right Watch semakin kuat perannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam proses penentuan politik dan strategis. Kelompok ini menjadi kelompok penekan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

3. Perkembangan Regional

Perkembangan regional yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir telah berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terkecuali

Indonesia. Adapun perkembangan regional yang terjadi tersebut adalah sebagai berikut :

a. **Asia Timur**

- 1) Perkembangan terakhir di Semenanjung Korea telah menunjukkan gejala yang positif terhadap kemungkinan terwujudnya Reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan setelah pertemuan yang bersejarah kedua pemimpin di Pyongyang.
- 2) Perkembangan di Semenanjung Korea tersebut juga telah mendorong pemimpin pemerintah Taiwan untuk memanfaatkan momentum tersebut dalam rangka menuju perdamaian dengan RRC.

b. **Pasifik Selatan**

- 1) Australia makin meningkatkan pengaruhnya untuk dapat mengontrol negara-negara di Pasifik Selatan bahkan di kawasan regional Asia Tenggara dengan turut campur untuk memisahkan Timor Timur dari Indonesia.
- 2) Papua Nugini sebagai negara Pasifik Selatan mempunyai kedekatan wilayah, etnis dan agama serta budaya dengan Irian Jaya. Perannya di dalam "Melanesian Brotherhood Solidarity" dapat berpengaruh terhadap integritas RI di Irian Jaya. Hal yang telah diketahui adalah banyaknya anggota GPK/OPM yang berlindung di PNG pada masa lalu.

c. **Asia Tenggara**

- 1) Negara Asia Tenggara pada umumnya mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka berpendapat bahwa Indonesia sebagai negara yang paling besar

wilayah dan jumlah penduduknya mempunyai peranan yang sangat besar di dalam mewujudkan ketahanan regional Asia Tenggara.

2) Malaysia sebagai negara serumpun yang sangat dekat wilayahnya dengan Indonesia secara politis selalu mendukung Indonesia namun permasalahan yang melibatkan kedua negara dalam klaim pulau Sipadan dan Ligitan serta banyak tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berada di Malaysia sedikit mengganggu hubungan kedua negara.

4. Perkembangan Nasional

Perkembangan nasional yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir telah berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Adapun perkembangan nasional yang terjadi tersebut dapat dilihat dari setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia sebagai berikut :

a. Ideologi

- 1) Pancasila sebagai ideologi tidak lagi menjadi satu-satunya asas bagi organisasi politik dengan telah dicabutnya Tap Nomor : II/MPR/1987.
- 2) Bubarnya negara komunis Uni Soviet tidak membawa pengaruh terhadap berkembangnya faham Marxisme/Komunisme di Indonesia yang dengan mudah dipelajari oleh generasi muda karena telah beredar dengan pesat buku-buku tentang Marxisme/Komunisme.
- 3) Munculnya organisasi politik seperti Partai Rakyat Demokrat (PRD) yang berbasis pada Marxisme mempunyai kecenderungan dalam kegiatannya di dalam menyulut aksi-aksi demo anti pemerintah dan Polri/TNI dengan mengatasnamakan demokrasi.
- 4) Keberadaan PRD dan segala aktivitasnya sangat terasa di kalangan Perguruan Tinggi, di mana mereka telah berhasil

menguasai kehidupan mahasiswa dengan membentuk organisasi kemahasiswaan di luar organisasi mahasiswa yang resmi. Kegiatan-kegiatan mereka sebenarnya telah tercium oleh aparat keamanan, namun karena permasalahan HAM dan demokrasi serta tidak adanya bukti autentik tentang aktivitasnya yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan maka mereka tidak dapat ditindak. Patut disayangkan bahwa pimpinan perguruan tinggi menganggap kegiatan mereka bukan suatu permasalahan.

b. Politik

- 1) Kondisi politik di Indonesia masih diwarnai kepentingan-kepentingan politik para elit politik yang ditandai dengan hubungan yang tidak serasi antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif, seperti permasalahan penggunaan hak interpelasi oleh DPR.
- 2) Sering muncul statemen-statemen politik dari Presiden Gus Dur yang kemudian sering menimbulkan pro dan kontra di kalangan elit politik dan masyarakat ditambah dengan sikap inkonsistensi terhadap statemen-statemen yang telah dikeluarkan sebelumnya, telah menurunkan kewibawaan pemerintah serta ketidakpercayaan masyarakat.
- 3) Adanya keinginan dari salah satu partai politik sebagaimana dikemukakan oleh pimpinannya untuk mengembalikan bunyi sila pertama Pancasila seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 kepada bunyinya yang semula yang tercantum pada Piagam Jakarta, yaitu menyangkut kata-kata "dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya" ingin mereka masukkan ke dalam Pasal 29 UUD 1945, namun sebagian besar Fraksi maupun tanggapan masyarakat tidak menyetujuinya. Meskipun demikian mereka masih akan terus memperjuangkannya.

Masalah tersebut juga telah mengundang reaksi keras dari sebagian masyarakat Minahasa yang menentang munculnya hal-hal yang bersifat diskriminatif di dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam masalah agama.

4) Pada tahun 1999 pemerintah dengan persetujuan DPR telah mengesahkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini telah semakin mendorong pelaksanaan otonomi daerah, meskipun masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi, karena adanya kecenderungan terjadinya euphoria yang dapat mengarah kepada disintegrasi di beberapa daerah. Salah satu contoh adalah seorang Bupati yang tidak mau menghadap Gubernur, karena merasa tidak di bawah Gubernur.

c. **Ekonomi**

1) Permasalahan ekonomi dewasa ini masih mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia akibat besarnya beban hutang swasta serta adanya fluktuasi nilai Rupiah terhadap valuta asing (khususnya USD). Permasalahan konflik politik acap kali memberikan dampak terhadap fluktuasi nilai Rupiah akibat sentimen pasar.

2) Kesenjangan ekonomi yang terjadi antara pusat dan daerah dewasa ini telah diangkat menjadi salah satu alasan beberapa daerah seperti Aceh, Riau dan Irian Jaya untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, meskipun dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah telah menawarkan kondisi yang jauh lebih menguntungkan daerah-daerah tersebut.

d. Sosial Budaya

- 1) Konflik SARA yang terjadi di Maluku, Poso, Mataram dan juga di beberapa daerah lainnya telah menunjukkan sangat rentannya persatuan dan kesatuan Indonesia dalam permasalahan ini. Berlakunya darurat sipil di Maluku masih memerlukan waktu untuk dapat menyelesaikan konflik secara tuntas.
- 2) Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan hukum yang berlaku telah mengakibatkan jatuhnya korban dari para tersangka pelanggar hukum pengadilan secara brutal oleh masyarakat. Hal ini sebenarnya lebih menggambarkan kualitas sumber daya manusia pada sebagian masyarakat Indonesia yang belum memahami "Supremasi Hukum/Penegakan Hukum".

e. Hankam

- 1) Sesuai dengan tuntutan perkembangan maka dewasa ini Polri dipisahkan dari TNI. Fungsi keamanan dilaksanakan oleh Polri sedangkan fungsi pertahanan dilaksanakan oleh TNI. Di dalam hal-hal yang khusus TNI diperbantukan kepada Polri untuk menangani masalah keamanan.
- 2) Menghadapi permasalahan dalam negeri Polri dan TNI tidak dapat melepaskan diri dari adanya tuntutan HAM dan demokrasi karena belum ada dasar hukum untuk bertindak tegas sehingga acapkali terjadi permasalahan yang menjurus ke anarki oleh masyarakat.

5. Peluang dan Kendala

Dari pengaruh perkembangan lingkungan strategi terhadap integrasi nasional khususnya kesadaran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dapat dicermati adanya peluang dan kendala sebagai berikut :

a. **Peluang**

- 1) Keruntuhan Blok Timur dan bubarnya negara Uni Soviet telah memperlemah dukungan terhadap paham Marxisme/Komunisme, sehingga kepentingan sisa-sisa PKI untuk mengkomuniskan Indonesia melemah. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia lebih mendapat kesempatan untuk memperkuat akar budaya bangsa.
- 2) Kemajuan teknologi di era globalisasi akan lebih memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi bagi kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.
- 3) Perkembangan dari situasi di Semenanjung Korea setelah dua pemimpin Korea bertemu serta perkembangan politik di Taiwan merupakan referensi dari pemerintahan Indonesia untuk dapat mewujudkan integrasi nasional.
- 4) Peranan badan-badan dunia perlu dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia di dalam pemulihan krisis ekonomi sekaligus mengurangi ketegangan politik dan juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
- 5) Undang-Undang otonomi Daerah tahun 1999 yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah akan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan aspirasinya.

b. **Kendala**

- 1) Keruntuhan Blok Timur dan kubu komunis telah membawa posisi Amerika Serikat sebagai negara adidaya tunggal yang sering

bertindak sebagai polisi dunia dan mengintervensi negara lain sesuai kepentingannya.

2) Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tanpa dapat dicegah, padahal implementasi nilai-nilai Pancasila pada saat ini dalam kondisi yang menurun sehubungan dengan perkembangan politik di Indonesia.

3) Badan-badan internasional sering dimanfaatkan oleh negara-negara maju untuk memojokkan Indonesia dengan isu-isu global seperti demokratisasi, HAM dan lingkungan hidup.

4) Masalah yang terjadi pada negara-negara eks Uni Soviet, Yugoslavia serta lepasnya Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi referensi kelompok separatis untuk melakukan disintegrasi.

5) Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi kendala khususnya dalam penanganan kerusuhan, konflik-konflik karena Polri dan TNI belum mendapat landasan hukum untuk dapat bertindak tegas sehubungan dengan adanya tuntutan demokrasi dan HAM yang berlebihan.

6) Menurunnya kepercayaan rakyat kepada peminan nasional akibat statemen-statemen yang inkonsistensi. Salah satunya yang mengundang pro dan kontra adalah keinginan untuk mencabut Tap No. XXV/MPRS/1966 tentang peiarangan Partai Komunis Indonesia dan ajaran Marxisme/Komunisme.

BAB – V

KESADARAN KEBANGSAAN INDONESIA YANG DIHARAPKAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat mempertahankan integrasi nasionalnya, apabila seluruh warga negaranya memiliki kesadaran yang tinggi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana mereka menyadari bahwa bangsa dan negara ini terwujud dari integrasi wilayah, suku bangsa, adat dan budaya serta agama yang berada di seluruh kepulauan nusantara, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Adapun kondisi kesadaran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan dapat dicermati dari kondisi ideal di segenap aspek kehidupannya sebagai berikut :

1. Kehidupan Ideologi

Kesadaran warga negara terhadap ideologi Pancasila yang juga merupakan pandangan hidup dan dasar negara, tercermin dari kehidupannya yang meyakini kebenaran Pancasila dan menjunjung tinggi moral dan etika sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai berikut :

- a. Ketaqwaan dan keimanannya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan di dalam kehidupannya dan kerukunannya sebagai umat beragama yang saling menghormati satu dan lainnya.
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara yang diwujudkan dengan menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus hidup saling menghormati dan bergotong royong.

c. Kesadaran untuk menjaga nilai-nilai kesatuan dan persatuan sebagai bangsa yang mendiami wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam pelaksanaan demokrasi yang berdasarkan tertib hukum demi terciptanya ketertiban sosial.

e. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia.

2. Kehidupan Politik

Kesadaran warga negara dalam kehidupan politik diwujudkan dalam kehidupan demokrasi yang sehat sebagai hasil dari pendewasaan politik warga negara serta budaya politik yang sesuai dengan moral dan etika sebagai bangsa yang beradab yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsanya di atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dengan selalu mengedepankan hukum dan hak azasi manusia di dalam menyampaikan aspirasi politiknya. Dalam kondisi seperti itu maka pimpinan nasional dan elit politik diharapkan akan menjadi teladan bagi setiap warga negara, dalam pemikirannya, bersikap, bertindak serta perilakunya yang akan memberikan suasana kondusif bagi terwujudnya demokrasi, serta selalu mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan.

3. Kehidupan ekonomi

Kesadaran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diwujudkan dalam membangun perekonomian yang sehat yang mampu membawa bangsa dan negara Indonesia, untuk dapat turut berkiprah dalam era persaingan bebas, dengan pemberdayaan daerah sesuai hak otonominya yang mampu memberikan kontribusinya terhadap penghasilan devisa daerah dan

negara. Terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar terhindar dari ketergantungan atau kecurangan-kecurangan bangsa lain yang lebih maju yang dikarenakan adanya kelemahan sumber daya manusia Indonesia. Implementasi pembangunan daerah tetap mengutamakan kebersamaan dengan memperhatikan saling kerjasama dan saling mendukung antara daerah satu dan lainnya sehingga dapat mengeliminir kemungkinan terjadinya kesenjangan di dalam implementasi otonomi daerah.

4. Kehidupan Sosial Budaya

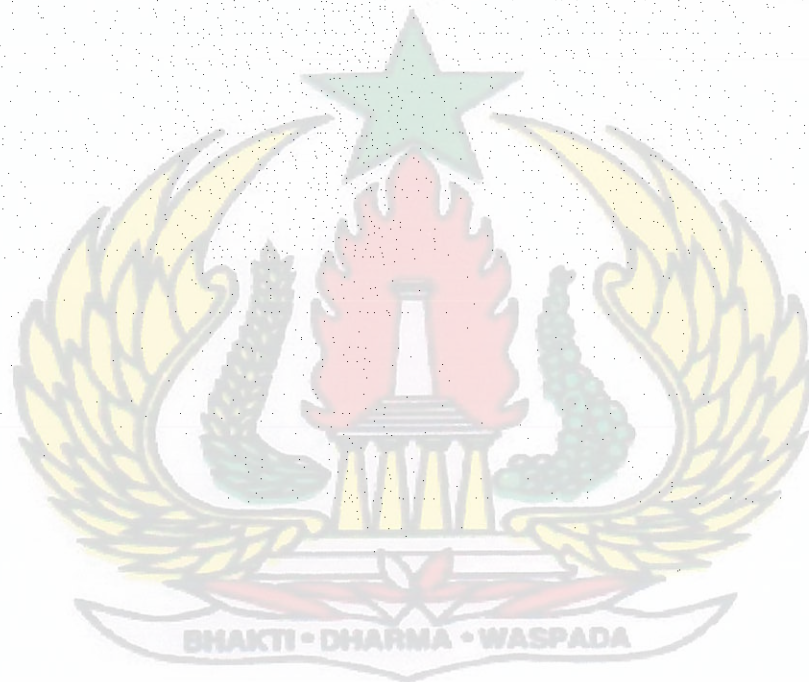
Segenap warga negara Indonesia sebagai suatu bangsa yang terdiri dari begitu banyak suku-suku bangsa beserta keragaman adat istiadat, kebudayaan daerah serta agama yang berbeda-beda diharapkan mampu menghargai segala macam perbedaan di dalam kebhinekaannya. Hal tersebut dicerminkan dari sikap saling menghormati atas perbedaan yang ada. Hal ini dilaksanakan dengan saling menghargai serta tetap berupaya melestarikan segala bentuk keragaman bangsanya, sebagai suatu kekayaan yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang harus dijaga kelestariannya. Sikap saling menghargai dan menghormati juga diwujudkan dengan menciptakan tertib hukum dan tertib sosial serta menjauhi segala perbuatan yang bersifat anarki. Dengan demikian akan terhindar segala bentuk primordialisme yang sempit serta fanatisme agama yang berlebihan yang dapat menimbulkan konflik-konflik SARA.

5. Kehidupan Pertahanan dan Keamanan

Permasalahan bidang pertahanan dan keamanan tidak selalu menjadi tanggung jawab TNI dan Polri, namun seluruh warga negara harus turut serta di dalam mempertahankan kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini lebih merupakan perwujudan dari kesadarannya akan kewajiban di dalam pembelaan negara yang didasari rasa cinta tanah air dan

rela berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan dan kehormatan bangsa dan negaranya.

Untuk itu setiap warga negara harus merasa terpanggil untuk menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang timbul dari luar maupun dari dalam yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara.



BAB – VI

KONSEPSI PENINGKATAN KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

1. Umum

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentuk 55 tahun yang lalu, merupakan suatu negara yang masyarakatnya sangat majemuk. Para Pendiri Negara telah menyadari bahwa di dalam kekayaan budayanya yang sangat banyak ragamnya, maka kemajemukan tersebut sekaligus juga merupakan kerawanan yang harus dijaga sepanjang masa. Oleh karenanya dengan didorong oleh jiwa kebangsaan dan rasa persatuan dan kesatuan, maka diletakkanlah "Pancasila" sebagai fundamen dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan dilahirkan. Mereka menyadari bahwa bangsa yang majemuk ini harus dapat dibebaskan dari permasalahan-permasalahan yang dapat menimbulkan kerawanan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, yang saat ini lebih kita kenal sebagai faktor-faktor disintegrasi bangsa. Oleh karenanya dengan kesadaran yang tinggi didasari ketulusan yang mendalam mereka menghapus 7 kata yang tercantum pada Piagam Jakarta yang telah menimbulkan kegelisahan saudara-saudaranya di kawasan Timur Indonesia. Tentu saja mereka sadar bahwa meskipun penduduk kawasan Timur Indonesia merupakan minoritas dari segi jumlah tetapi mereka mendiami suatu kawasan yang sangat luas dari negara ini.

Dengan mempelajari suasana kebatinan para "Pendiri Negara" seperti di atas, maka seluruh warga negara Indonesia, apabila mereka mengatakan bahwa mereka mencintai negara ini selalu memberikan pengorbanannya demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, haruslah dengan penuh kesadaran dengan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya, menyikapi segala bentuk faktor-faktor disintegrasi bangsa dengan upaya-upaya positif demi kokohnya integrasi nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini perlu suatu konsep atau rumusan konkrit dalam menentukan kebijaksanaan,

strategi maupun langkah/upaya yang diambil, yang sesuai norma dan perkembangan lingkungan strategis serta tingkat kesadaran berbangsa dan bernegara yang diharapkan.

2. Kebijakan

Peningkatan kesadaran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diarahkan untuk terwujudnya kehidupan yang harmonis dari seluruh masyarakat Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, aman, sentosa dan tingkat Ketahanan Nasional yang mampu menghadapi setiap ancaman disintegrasi, yang tercermin dalam sikap dan perilaku warga negara Indonesia yang rela berkorban dan cinta kepada tanah airnya, masyarakat Indonesia yang hidup damai dan sejahtera dalam suasana demokrasi dan tegak hukum, pemimpin bangsa yang mengutamakan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta Pemerintah dan pemimpin nasional yang mencintai rakyat dan mendapat kepercayaan penuh serta dicintai rakyatnya.

3. Strategi

a. Langkah-langkah Pokok

- 1) Memasyarakatkan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara
Pancasila sebagai dasar negara yang bermuatan nilai-nilai luhur budaya bangsa harus terpatri sebagai pandangan hidup yang diimplementasikan di dalam pergaulan masyarakat dan sebagai dasar pembangunan.
- 2) Mengedepankan tokoh adat/masyarakat dan tokoh agama di dalam membina kehidupan yang serba majemuk
Masyarakat diarahkan untuk menyadari kemajemukan bangsanya dan mengetahui bahwa tanah air yang didiaminya merupakan negara kesatuan, yang terdiri dari wilayah/wilayah

daerah kerajaan di masa lalu yang menjalani nasib yang sama, selama 350 tahun berada di dalam penjajahan. Masyarakat Indonesia harus diarahkan untuk hidup saling menghormati atas perbedaan yang ada serta mentaati peraturan, hukum serta Hak Azasi Manusia sehingga mampu menciptakan ketertiban, yang meliputi tertib politik, tertib hukum, tertib administrasi dan tertib sosial.

- 3) Perlu didorong/dimanfaatkan peran putra daerah untuk meningkatkan pembangunan di daerah dalam rangka menuju terwujudnya otonomi daerah

Ini perlu dilakukan agar tercapai kemandirian daerah di dalam melaksanakan/mengimplementasikan otonomi daerah, di mana secara bertahap daerah dapat melepaskan ketergantungannya dari pusat.

- 4) Pemanfaatan peran media massa di dalam menciptakan tertib hukum, tertib sosial dalam kehidupan masyarakat
Media massa cetak dan elektronik perlu dilibatkan untuk pendewasaan kehidupan masyarakat, di mana setiap warga negara Indonesia diarahkan untuk mewujudkan kehidupan yang aman sejahtera dalam rangka terwujudnya masyarakat yang berbudaya, adil makmur, sejahtera lahir batin.

- 5) Meningkatkan disiplin nasional dan penegakkan hukum
Seluruh instansi terkait perlu dilibatkan untuk penegakkan disiplin dan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya budaya disiplin dan tertib hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan menjauhkan warga negara dari tindakan-tindakan negatif seperti pelanggaran peraturan maupun tindak kriminal.

6) Memasyarakatkan unsur-unsur perekat bangsa

Unsur-unsur perekat bangsa harus disosialisasikan ke dalam kehidupan masyarakat. Melalui unsur-unsur perekat bangsa ini diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih didorong untuk menyadari rasa kebangsaannya.

7) Memberikan perhatian khusus kepada daerah dan memiliki kecenderungan disintegrasi yang tinggi

Sesuai dengan GBHN maka pemerintah perlu secara aktif menuntaskan permasalahan-permasalahan disintegrasi di daerah-daerah khusus seperti Aceh, Irija dan Maluku serta melaksanakan kebijaksanaan otonomi daerah sesuai yang telah digariskan.

8) Mendekatkan kembali hubungan TNI dan Rakyat

Agar tumbuh kembali hubungan yang harmonis antara TNI dan rakyat maka perlu didorong sikap kesadaran bela negara dan cinta tanah air dari seluruh warga negara.

9) Membuka kesempatan terwujudnya pembauran dan asimilasi

Antara suku satu dan suku lainnya, antara agama satu dan agama lainnya, serta antara warga negara asli dan warga negara keturunan perlu lebih didorong dan mendapatkan kesempatan/perlakuan yang sama baik di bidang pekerjaan, pergaulan umum maupun di dalam hubungan perkawinan yang bersifat asimilasi.

b. Tujuan

- 1) Meningkatnya kesadaran setiap warga negara agar dapat memberikan kontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mampu menghadapi setiap bentuk ancaman terhadap integrasi nasional.
- 2) Tumbuhnya kesadaran bela negara dan kecintaan pada tanah air Indonesia yang berdasarkan pandangan hidup dan ideologi negara "Pancasila".

c. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan kesadaran warga negara di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meliputi :

- 1) Tetap lestarynya Pancasila sebagai dasar negara yang menjwai seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan mampu berkiprah di dalam kehidupan internasional/antar bangsa/pergaulan dunia.
- 2) Terwujudnya kerukunan hidup warga negara baik antar suku, antar golongan, antar agama, dan tetap terjalinnya persatuan dan kesatuan meskipun di dalam kehidupan yang serba majemuk.
- 3) Terwujudnya otonomi daerah yang mampu memberikan kontribusinya bagi pembangunan nasional dalam rangka Ketahanan Nasional.
- 4) Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berbudaya, berdisiplin serta taat kepada peraturan/hukum yang berlaku di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum.

5) Terwujudnya kesadaran bela negara dan rasa cinta tanah air yang didukung adanya hubungan harmonis antara TNI, Polri dan masyarakat.

d. **Subyek**

- 1) Pemerintah
- 2) Lembaga Pemerintah
- 3) Pemerintah Daerah.

e. **Obyek**

- 1) Setiap warga negara Indonesia
- 2) Tokoh masyarakat (tokoh adat, tokoh agama)
- 3) Elit politik.

f. **Metoda**

Metoda yang digunakan di dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan kesadaran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencegah disintegrasi bangsa adalah meliputi

1) **Keteladanan**

Yaitu segala pola sikap, pola tindak dan perilaku serta ucapan dari setiap insan warga negara Indonesia, yang dalam status kedudukannya berkesempatan menjadi pimpinan pemerintahan, lembaga negara, elit partai dan elit politik, tokoh masyarakat, dapat dijadikan suri tauladan masyarakat Indonesia yang mempercayai kepemimpinan dan menaruh harapan atas kepemimpinannya.

2) Sosialisasi

Yaitu semua langkah-langkah yang bertujuan untuk memasyarakatkan paradigma nasional, peraturan-peraturan serta hukum yang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia.

3) Edukasi

Yaitu semua pendidikan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar dalam pembangunan nasional, berakhlak dan bermartabat serta memiliki intelektualitas yang memadai.

4) Persuasif

Yaitu langkah-langkah yang mengutamakan pendekatan manusiawi dalam menggugah kesadaran warga negara agar secara tulus ikhlas melakukan yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negaranya.

5) Penghargaan dan Sanksi (Reward and Punishment)

Yaitu memberikan penghargaan bagi setiap warga negara yang berprestasi dan menunjukkan perjuangannya bagi bangsa dan negara. Dan sebaliknya bersikap tegas terhadap setiap jenis pelanggaran atas aturan/hukum yang berlaku tanpa membedakan status dari setiap warga negara.

6) Pembauran/Asimilasi

Yaitu langkah-langkah dalam bentuk kegiatan nyata untuk mendorong terwujudnya pergaulan yang lebih nyata dan menyatu diantara suku-suku bangsa di Indonesia, termasuk dengan warga keturunan asing yang telah menjadi WNI, baik di dalam lapangan pekerjaan, pergaulan sesama warga masyarakat, organisasi sosial dan kemasyarakatan bahkan dalam bentuk perkawinan campur.

4. Upaya-upaya

Upaya-upaya yang perlu dilaksanakan di dalam peningkatan kesadaran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada hakekatnya merupakan aktualisasi dari keinginan untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa dan negara. Adapun upaya-upaya tersebut antara lain meliputi :

a. Upaya-upaya memasyarakatkan kembali "Pancasila" sebagai Dasar Negara

Disadari bahwa begitu banyak kritik terhadap cara memasyarakatkan Pancasila di masa Orde Baru yang terkesan adanya "indoktrinasi" di mana para peserta kursus P-4 acapkali harus menuruti pendapat para penatar/manggalanya. Sampai kemudian di era reformasi Tap MPR Nomor : II/MPR/1978 dicabut dan BP-7 dibubarkan. Namun sebenarnya tidak semua kebijaksanaan pemerintah orde baru itu jelek. Tujuan untuk mengangkat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara jelas suatu tujuan yang mulia dan oleh karenanya perlu ditempuh pelurusan sosialisasinya, agar tidak mengikuti kemauan penguasa, akan tetapi lebih dititik beratkan kepada pendidikan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa upaya memasyarakatkan Pancasila yang dapat ditempuh antara lain :

- 1) Fungsi BP-7 di masa lalu dalam memasyarakatkan Pancasila secara berkesinambungan, perlu diwadahi Departemen Pendidikan Nasional di mana pendidikan nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dapat menjadi kurikulum tersendiri atau bersama-sama/sejajar dengan pendidikan budi pekerti dan agama. Hal ini untuk menghindari kesan di masa lalu seolah-olah Pancasila disakralkan lebih dari agama.
- 2) Penyampaian nilai-nilai Pancasila harus dimulai dengan pemahaman dan penghayatan bagaimana nilai-nilai luhur budaya

bangsa itu dirumuskan oleh para "Pendiri Negara" serta tujuan mulianya untuk memberikan pedoman/pandangan hidup bangsa yang sangat majemuk dan bagaimana suasana kebatinan mereka untuk terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, agar tetap bertahan sepanjang masa.

3) Berkaitan dengan memasyarakatkan Pancasila, hal-hal yang positif di masa lalu perlu diangkat kembali seperti, simulasi tentang Pancasila, cerdas cermat yang diadakan untuk SD, SLTP dan SMU yang disesuaikan materinya dengan tingkat intelektualitas.

b. Upaya-upaya Mengedepankan Tokoh Adat/Masyarakat

Bangsa Indonesia yang terdiri dari suku-suku bangsa dengan beragam bahasa daerah dan bahasa ibu tidak dapat dipungkiri mempunyai adat istiadat yang begitu banyak, sehingga seringkali seseorang "ditokohkan" di lingkungannya, sesuai tata cara dan adat istiadat setempat. Hal itu tak luput dari masih kentalnya budaya paternalistik di sebagian besar suku-suku di Indonesia. Pada umumnya tokoh-tokoh adat ini memiliki kelebihan-kelebihan dari masyarakatnya dalam hal kebijaksanaan, perilakunya yang dapat diteladani serta penguasaannya terhadap aturan-aturan yang berlaku di masyarakatnya dan pada umumnya mereka memiliki kharisma tersendiri terhadap masyarakatnya.

Atas kelebihan yang ada pada tokoh adat/masyarakat tersebut, maka mereka mempunyai pengaruh yang kuat terhadap masyarakatnya, di mana setiap tindakan, perilaku, ucapan dan pemikiran-pemikirannya dapat memberikan motivasi yang positif bagi masyarakatnya. Dengan dasar itulah maka pemerintah perlu memberi peran yang besar dalam mendorong terwujudnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Beberapa hal yang dapat ditempuh dalam mengedepankan tokoh adat ini antara lain :

- 1) Memelihara adat istiadat dan budaya setempat agar tetap lestari dan tetap menjadi kekayaan budaya bangsa.
- 2) Memperlakukan para tokoh adat sesuai kedudukannya di dalam masyarakatnya, di mana mereka selalu disertakan di dalam pembangunan di daerahnya.
- 3) Memberi kesempatan para tokoh adat untuk dapat berinteraksi dengan tokoh-tokoh adat di daerah lain, agar terbina/terjalin hubungan yang harmonis, di mana mereka akan dapat saling mengisi satu sama lainnya serta lebih mengenal adat istiadat/budaya daerah lain serta disampaikan kepada masyarakatnya.
- 4) Membina tokoh adat/masyarakat di daerah untuk bertindak sebagai juru bicara menyampaikan pesan persatuan dan kesatuan agar tidak muncul bentuk-bentuk primordialisme yang sempit yang dapat membahayakan integrasi nasional.

c. Upaya-upaya Mengedepankan Tokoh Agama

Bangsa Indonesia yang pada dasarnya merupakan masyarakat yang religius, sangat menghargai tokoh-tokoh agama/ulama, seperti Ketua Pondok Pesantren, Kyai-kyai, Pastor, Pendeta dan Bisku. Pengaruh tokoh agama ini umumnya sangat kuat terhadap masyarakatnya. Ucapan, ceramah, khotbah dan nasehat yang bernuansa keimanan dan ketaqwaan selalu menjadi penyejuk dalam kehidupan masyarakatnya. Karenanya pemerintah perlu selalu mengadakan pendekatan kepada mereka sambil menitipkan pesan persatuan dan kesatuan. Dan mereka inilah modal dan etika bangsa dapat terus diupayakan untuk dijaga agar dapat memiliki dasar keimanan dan ketaqwaan sehingga mampu menyikapi segala bentuk perubahan yang dapat menjatuhkan akhlak masyarakat. Peran tokoh agama ini tidak melulu harus melalui mimbar di tempat-tempat ibadah, tetapi dapat

melalui berbagai macam cara seperti media massa serta dialog-dialog antar umat agama.

Hal-hal yang perlu dibina dalam peran tokoh-tokoh agama adalah bagaimana selalu memberikan kesejukan bagi umatnya dan bagi umat beragama lainnya dan menghindari fanatisme yang sempit, dengan demikian dapat dieliminir munculnya permasalahan SARA dengan "back ground" agama. Hal-hal yang perlu dilakukan sehubungan dengan peran tokoh-tokoh agama antara lain :

- 1) Dialog antar agama dan umat beragama di mana pemerintah dapat sebagai fasilitator dan motivator untuk setiap upaya yang menuju kerukunan umat beragama dan antar agama.
- 2) Memimpin umatnya untuk aksi sosial/bakti sosial tidak saja di kalangan umatnya tetapi sudah lebih kepada masyarakat umum. Dalam hal ini keteladanan ditunjukkan secara nyata di lapangan sebagai aktualisasi dan kotbah/ceramah yang disampaikannya melalui mimbar.
- 3) Para tokoh agama perlu mengantarkan dalam kotbahnya tentang keimanan dan ketaqwaan, menekankan masalah moral, etika, kasih dan perdamaian di antara sesama sebagai bagian dari "Nation and Karakter Building".

d. Upaya-upaya meningkatkan Peranan Putra Daerah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari daerah-daerah dengan adat dan budaya yang beragam serta suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah tanah air, telah memberikan kekayaan budaya bangsa. Namun demikian harus disadari bahwa setiap warga negara Indonesia dari setiap suku bangsa yang ada, merasa memiliki hak yang sama di dalam pengabdianya kepada nusa dan bangsa. Untuk itu mereka harus mendapat kesempatan yang sama untuk berperan dalam pemerintahan dan pembangunan baik di daerahnya maupun di pusat.

Harus dihindarkan diskriminasi kedaerahan dan kesukuan, sehingga setiap warga negara merasa turut serta memiliki negara ini dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang besar. Untuk meningkatkan peran putera daerah dalam pemerintahan dan pembangunan perlu ditempuh upaya-upaya, antara lain sebagai berikut :

- 1) Pemerintah perlu membantu dan mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Kejuruan-kejuruan serta kebutuhan tenaga ahli yang berkualitas perlu didorong untuk diadakan di daerah, atau bila hal tersebut masih memerlukan proses cukup panjang, maka putera daerah perlu diberi kemudahan mengikuti pendidikan di daerah yang lebih maju namun tetap diarahkan untuk mengabdikan ilmunya bagi daerah.
- 2) Kesempatan lapangan kerja perlu diciptakan dan pemberian kesempatan pada putera daerah perlu lebih dibuka, agar lapangan kerja/jabatan dalam pemerintahan tidak menjadi monopoli suku yang mayoritas.
- 3) Tenaga-tenaga ahli yang dikirim di daerah harus ditujukan untuk membantu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di daerah, bukannya untuk mencari kesempatan finansial semata atau memperoleh kesempatan untuk menjabat di daerah. Kecuali apabila daerah benar-benar memerlukan keberadaan mereka dan sudah menganggapnya sebagai bagian dari daerah atas dasar pengabdian secara tulus diakui oleh daerah di mana mereka bermukim.
- 4) Pemerintah perlu lebih banyak membantu agar daerah dapat lebih mampu menyiapkan sarana/prasarana pendidikan yang diperlukan sampai pada saatnya memberi kesempatan daerah untuk lebih mandiri.
- 5) Keberadaan suku Jawa atau Sunda yang merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia perlu diakomodasikan secara

tepat, untuk menjaga agar tidak timbul adanya dominasi terhadap suku-suku yang lainnya, sehingga tidak timbul kesan "Jawanisasi" atau "Penjabaran".

6) Ketentuan-ketentuan Otonomi Daerah perlu segera disosialisasikan, agar setiap warga negara/Putera Daerah lebih berperan dalam mendorong terlaksananya Otonomi Daerah serta memahami tujuan Otonomi Daerah. Hal tersebut selanjutnya diharapkan dapat mencegah terjadinya euphoria.

e. **Upaya-upaya Memanfaatkan Peran Media Massa**

Harus disadari bahwa media massa di era reformasi ini sangat besar pengaruhnya terhadap segenap aspek kehidupan bangsa. Bahkan di dalam dunia pers, tulisan pena seorang wartawan jauh lebih ampuh dari peluru, sehingga akan berpengaruh besar untuk terjadi konflik atau perdamaian suatu negara. Opini yang terwujud dalam pemikiran setiap warga negara akan mempengaruhi sikap, perilaku dan tindakannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era orde baru media massa dapat dipakai untuk menuruti kemauan penguasa, atau bila tidak maka dapat membawa kesulitan/kerugian bagi dunia pers sendiri. Namun demikian berubahnya suasana politik dan demokrasi, telah memberikan ruang gerak bagi media massa yang jauh lebih leluasa bahkan nyaris tidak terkendali. Pemerintah perlu memahami kemampuan komunikasi dan pemberian informasi dari media massa ini, untuk itu perlu digalang agar media massa benar-benar turut bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara, atas segala informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah antara lain :

1) Pemerintah bertindak sebagai "inisiator" di dalam mengadakan dialog-dialog tentang peranan media massa dan pers dalam pendewasaan masyarakat terhadap budaya politik, penegak

hukum dan HAM, demokratisasi, otonomi daerah dan integrasi nasional, dengan melibatkan para pakar sesuai disiplin ilmunya.

2) Pemerintah perlu menanamkan rasa simpati dari media massa/pers, dengan memberikan jaminan keamanan pada setiap insan pers, serta secara terbuka selalu mengajaknya untuk meliput kegiatan-kegiatan pemerintah serta memberikan kesan kedekatan para pejabat dengan dunia pers.

4) Pemerintah perlu menggalang media cetak agar memiliki tanggung jawab moral untuk bersama-sama menciptakan ketertiban sosial dalam kehidupan masyarakat, melalui pemberitaannya agar masyarakat tidak menjadi resah atau terpengaruh untuk bertindak di luar etika dan moral sebagai bangsa beradab dan mentaati hukum.

5) Pemerintah secara persuasif mendorong dunia pers untuk menyampaikan kebenaran/berita secara obyektif dan tetap bertanggung jawab atas persatuan dan kesatuan bangsanya dan jangan sampai dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan yang memungkinkan terjadinya disintegrasi bangsa.

6) Perlunya pemerintah mendorong dunia pers yang berjiwa nasional untuk memerangi pihak-pihak yang dengan sengaja mencari keuntungan bisnis semata melalui pemberitaan-pemberitaan yang telah dimanipulasi agar lebih mudah menarik perhatian masyarakat, tanpa memikirkan dampak negatifnya.

- f. Upaya-upaya meningkatkan Disiplin Nasional Warga Negara
- Disiplin Nasional apabila dapat dihayati oleh seluruh warga negara akan mendorong terciptanya tertib hukum dan tertib sosial dalam kehidupan masyarakat. Disiplin nasional tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum saja, tetapi juga kepada setiap aparat penegak hukum, pemerintahan dan para pengamat/pakar, dalam rangka mewujudkan kesadaran setiap warga negara untuk taat terhadap peraturan dan

ketentuan serta norma-norma yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan secara serempak oleh seluruh instansi pemerintah dan swasta terhadap karyawan/pegawai dan seluruh masyarakat umum, dengan menggunakan pendekatan kultural, psikologis dan struktural.

- 1) Pendekatan Kultural, yaitu melalui adat istiadat sesuai dengan masyarakatnya yang berbeda-beda, di mana telah tertata suatu sistem kehidupan sesuai dengan nilai dan norma dan tradisi yang berkembang di lingkungan masyarakat masing-masing. Ketaatan kepada adat istiadat yang telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari akan sangat baik menjadi penangkal dari pengaruh budaya asing yang tidak sesuai. Sebagai contoh adalah kebiasaan mengadakan selamatan sebelum memulai kegiatan pembangunan, saat akan panen dan sebagainya.
- 2) Pendekatan Psikologis, yaitu melalui ceramah-ceramah/Santiaji ini, arti kebebasan bukan berarti berbuat apa saja tanpa batas dan menurut kemauan secara individu, tetapi tetap harus menjaga kebersamaan secara bertanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan, peraturan dan hukum yang berlaku.
- 3) Pendekatan Struktural, pendidikan disiplin dilakukan/dimulai dari setiap individu, kemudian lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan pekerjaan/pemerintahan. Disini peran seorang sebagai panutan akan sangat menonjol, orang tua terhadap anak-anak dan keluarganya, pimpinan terhadap bawahannya. Hasil yang diperoleh akan tertanam secara perlahan-lahan namun akan mengakar. Sedangkan tindakan pemaksaan akan tidak efektif bahkan dapat menimbulkan antipati ataupun cenderung seenaknya bila dirasakan ada sedikit kebebasan.

Namun demikian hal yang penting dari pendekatan di atas adalah bagaimana cara melaksanakannya agar tujuan dari peningkatan disiplin nasional tersebut dapat sampai pada sasarannya, untuk itu hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Menggiatkan kegiatan kepramukaan di lingkungan lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, Organisasi Kemasyarakatan, baik di bidang Olah Raga maupun di bidang Sosial.
- 2) Menggiatkan Polri dalam penertiban disiplin berlalu lintas, penggunaan jembatan penyeberangan, penggunaan Helm dan sebagainya, namun yang perlu ditekankan adalah tindakan tegas dan profesional dari Polri, agar dapat menumbuhkan kesadaran berlalu lintas, di samping sikap penegakkan hukum yang konsisten dalam menghadapi tindak pelanggaran hukum.
- 3) Keteladanan dari pimpinan di perkantoran pemerintah maupun swasta, agar timbul keseganan dari bawahannya, dalam hal menepati waktu kerja, kesungguhan dalam pekerjaan di samping keterbukaan dalam kepemimpinan serta berupaya menciptakan suasana harmonis.
- 4) Setiap pimpinan selalu berupaya menciptakan suasana kerja yang bersih dan berwibawa, dengan mengadakan pengawasan melekat terhadap setiap pelaksanaan kegiatan di lingkungan kerjanya dan mendorong bawahannya agar menyadari tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya.
- 5) Setiap instansi yang mempunyai tugas pelayanan masyarakat harus berupaya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya di samping dengan tegas menerapkan ketentuan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan, agar rakyat dengan teratur menanti giliran dengan melaksanakan "Antri", sehingga menjadi suatu budaya yang positif demi terwujudnya tertib sosial.

6) Dalam kebersihan di tempat-tempat umum perlu adanya sanksi bagi setiap pelanggar kebersihan baik berupa tegoran sampai pada bentuk denda atau hukuman kurungan maupun kerja sosial. Hal tersebut perlu dilaksanakan agar masyarakat terbiasa untuk melaksanakan kebersihan di setiap lingkungannya.

g. Upaya-upaya Mengedepankan Peran Sosial TNI

Apabila di masa lalu masyarakat sipil begitu alergi dan apriori terhadap Dwi Fungsi ABRI, maka di masa mendatang, pada masa damai TNI dapat dikerahkan tenaganya dalam kegiatan-kegiatan bersifat sosial kemasyarakatan, di mana saat itu TNI tidak perlu menggunakan senjatanya namun kemampuannya dalam kegiatan sosial, yaitu turut serta dalam aksi-aksi sosial yang diadakan oleh instansi Sipil, antara lain meliputi :

- 1) Pembuatan jalan di pedesaan, membantu perbaikan perumahan akibat bencana alam, pembuatan jembatan sederhana, pembuatan tempat mandi/WC umum di pedesaan, yang semuanya sudah sering dilakukan pada saat program AMD di masa lalu, namun disini ditekankan kepada membantu kegiatan pembangunan daerah.
- 2) TNI disertakan dalam program pendidikan masyarakat desa tertinggal/pedalaman, di mana masih sangat kekurangan tenaga pendidik/guru, dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di pedesaan/pedalaman.

h. Upaya-upaya Memasyarakatkan Unsur-unsur Perekat Bangsa

Belum semua warga negara Indonesia mengetahui/mengenal unsur-unsur yang dapat menjadi perekat rasa kebersamaan sebagai bangsa Indonesia. Banyak sekali unsur-unsur yang dapat mendorong rasa kebangsaan yang perlu lebih dimasyarakatkan agar setiap warga

negara menyadari kesadarannya sebagai bangsa Indonesia yang berbahasa satu dan bertanah air satu "Indonesia". Untuk itu upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain :

- 1) Perlunya setiap instansi pemerintah, lembaga pendidikan, instansi swasta memiliki peta wilayah kepulauan Indonesia, yang diletakkan pada tempat/ruangan yang strategis/
- 2) Perlunya setiap instansi pemerintah/swasta dan lembaga-lembaga pendidikan melaksanakan upacara penaikan bendera/hari-hari besar nasional secara lebih disiplin.
- 3) Perlunya gambar-gambar para Pahlawan Nasional diberi keterangan/penjelasan ringkas tentang perjuangan yang dilaksanakannya di masa lalu, untuk memotivasi generasi muda sebagai penerus perjuangannya di alam kemerdekaan.
- 4) Perlu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada saat upacara bendera dan upacara besar lainnya.
- 5) Depdiknas perlu mendorong adanya ekstra kurikuler di sekolah-sekolah untuk mengikuti/mempelajari salah satu budaya setempat seperti tari-tarian, grup musik daerah dan sebagainya.
- 6) Di samping kewajiban mempelajari sejarah nasional, hendaknya Depdiknas menggali sejarah daerah setempat, termasuk pengenalan terhadap tokoh-tokoh daerah setempat, untuk kemudian saling diinformasikan/disampaikan ke daerah lain, sebagai kekayaan sejarah bangsa.

i. Upaya-upaya memberikan Perhatian Khusus Daerah dengan Kecenderungan Disintegrasi Tinggi

Dewasa ini di tanah air/Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat beberapa daerah dengan kecenderungan yang tinggi untuk terjadinya disintegrasi, yaitu diantaranya adalah Aceh, Irian Jaya dan Maluku. Untuk itu pemerintah mau tidak mau telah memberikan

penanganan secara khusus terhadap daerah-daerah tersebut, dalam usaha-usaha mencegah terjadinya disintegrasi. Di samping melaksanakan kegiatan yang bersifat persuasif, keteladanan, pendidikan dan perhatian lain yang bersifat persuasif, keteladanan, pendidikan dan perhatian lain yang bersifat khusus yang ditujukan menggugah kesadaran masyarakat daerah Aceh, Irian Jaya dan Maluku untuk tetap bersatu, berdamai di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka yang perlu dilakukan selain itu semua adalah :

- 1) Kesamaan visi elit politik dalam penanganan kasus-kasus konflik.
- 2) Dihindari/statemen-statemen politik yang justru dapat memprovokasi masyarakat.
- 3) Mewaspada/mencegah turut campurnya pihak asing yang memiliki kepentingan di daerah-daerah yang terjadi konflik.
- 4) Bagi para politisi yang sangat vokal menyoroti masalah HAM dan segala tindakan Polri/TNI, perlunya diberi kesempatan membuktikan ide-ide penyelesaian masalah yang mereka suarakan, untuk membuktikan apakah memang mereka seorang nasionalis yang idealis atau sebenarnya hanya provokator yang mempunyai kepentingan.
- 5) Perlunya tindakan tegas apabila situasi telah benar-benar membahayakan integritas nasional dan keselamatan bangsa/negara dengan terus mengedepankan diplomasi ke dunia internasional/PBB agar mereka dapat memahami tindakan-tindakan tegas Indonesia.

j. **Upaya-upaya membangkitkan Kesadaran Bela Negara dan Cinta Tanah Air melalui Hubungan TNI dan Rakyat**

Dengan tujuan membangkitkan kesadaran bela negara dan rela berkorban demi tanah air, maka di dalam latihan gabungan TNI, perlu

dilibatkan warga sipil meliputi pelajar, mahasiswa, Kamra, Ratih secara lebih nyata, khususnya mereka-mereka yang pada tataran usia generasi muda. Keterlibatan mereka tentunya tidak sampai menangani persenjataan secara langsung, namun mungkin dapat dimanfaatkan/dilihatkan dalam penyiapan Alutsista secara tidak langsung, seperti :

- 1) Ikut dalam penyiapan pesawat secara terbatas, ikut belajar memeriksa peralatan sebelum digunakan, dengan terlebih dahulu dikenalkan dan diberikan penjelasan tentang kegiatan pengamanan/Safety terhadap alutsita dan personil.
- 2) Mengikuti skenario latihan sebagai rakyat yang mendukung tentara dalam memberi informasi tentang bahaya-bahaya kedatangan musuh, cara-cara melaporkan keberadaan musuh dan sebagainya.
- 3) Memberi kesempatan mengikuti manuver lapangan dalam latihan-latihan penembakan target serangan, yang tentunya melalui pentahapan pengenalan, pelatihan dengan pembatasan-pembatasan tertentu, sejauh tidak mengganggu kegiatan latihan dan keselamatan personil.
- 4) Memberikan pelatihan tentang penanggulangan akibat suatu serangan militer, mengamankan rakyat, memberikan pertolongan pertama pada korban peperangan.
- 5) Bersama-sama TNI melaksanakan operasi bakti di daerah latihan dan turut serta mendinamisasikan masyarakat di daerah latihan agar turut menghayati perlunya doktrin Sishankamrata dalam mempertahankan kedaulatan negara.
- 6) Meneruskan pengalaman-pengalaman yang didapat kepada rekan-rekan generasi muda lainnya, agar terbentuk rasa cinta tanah airnya serta kesadarannya dalam membela bangsa dan negaranya.

k. Upaya-upaya Mendorong Terwujudnya Pembauran/Asimilasi dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, golongan, agama dan keturunan di samping memiliki kekayaan budaya namun juga memiliki sisi kelemahan untuk terwujudnya bentuk-bentuk primordialisme yang sempit. Untuk itu maka semua pihak perlu menyadari atas perbedaan yang ada dan dapat berupaya untuk menciptakan kehidupan yang harmonis di dalam kesetaraan, saling menghormati atas perbedaan yang ada dengan menjauhkan hal-hal yang dapat memperuncing setiap bentuk perbedaan kearah yang negatif. Adapun upaya-upaya yang dapat dilaksanakan antara lain :

- 1) Pemerintah perlu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara di dalam kesempatan memperoleh pendidikan, pelayanan, pekerjaan dan karier tanpa harus memandang suku, golongan, agama, maupun keturunan.
- 2) Pemerintah perlu menghilangkan segala bentuk "pembedaan" yang telah dilakukan selama ini, yang mengurangi ruang gerak warga negara untuk dapat melaksanakan kehidupannya secara bebas sesuai dengan hak dan kewajibannya, sebagai contoh dalam masalah kepemilikan KTP.
- 3) Pemerintah perlu memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia keturunan asing khususnya China dan India di dalam menempuh karier di pemerintahan baik sipil maupun Polri dan TNI, dengan demikian mereka tidak hanya terfokus pada usaha di bidang perekonomian/perdagangan. Hal ini juga akan memberikan kesempatan warga negara Indonesia keturunan asli untuk dapat berkiprah di bidang ekonomi dan perdagangan.
- 4) Baik pemerintah maupun semua pihak dalam masyarakat perlu saling mendorong terwujudnya pembauran yang lebih nyata

dalam pergaulan/kehidupan sosial kemasyarakatan maupun hal yang lebih jauh yang menyangkut perkawinan antar suku, maupun antar WNI keturunan penduduk asli dengan WNI keturunan asing. Secara persuasif mungkin lebih diaktifkan melalui bidang-bidang seni dan budaya, seperti film, telenovela, sandiwara, dan sejenisnya. Hal ini ditujukan untuk dapat menembus tembok perbedaan kebudayaan di antara sesama anak bangsa, sehingga terjadi interaksi budaya secara positif.

- I. Upaya-upaya Keteladanan oleh Elit Politik dan para Pemimpin Masyarakat Indonesia pada umumnya masih sangat menjunjung tinggi adat ketimuran, dimana sikap, perilaku dan pola tindak mereka yang di dalam kedudukannya di masyarakat berkedudukan sebagai tokoh politik maupun sebagai pemimpin nasional/pemimpin masyarakat. Sikap keteladanan mereka akan sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat keseluruhan. Untuk itu hal-hal yang perlu dijaga dan dilakukan oleh mereka antara lain :
 - 1) Para pemimpin bangsa dan elit politik perlu menjaga statemen-statemen dan ucapan-ucapannya yang dapat berakibat meresahkan masyarakat, karena kesalahan di dalam ucapan-ucapan seorang pemimpin akan mengurangi kepercayaan masyarakat.
 - 2) Para pemimpin dan elit politik perlu mengadakan komunikasi/dialog diantara mereka dalam rangka memecahkan permasalahan-permasalahan kemasyarakatan dengan cara yang membawa kesejukan bagi kehidupan masyarakat.
 - 3) Para pemimpin bangsa dan para elit politik perlu menghindari sikap-sikap pemimpin pada masa sebelumnya yang lebih menonjolkan adanya arogansi kekuasaan.

- 4) Para pemimpin bangsa dan para elit politik harus lebih bersikap transparan di dalam kepemimpinannya serta lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan organisasi politiknya/kelompoknya.
- 5) Para pemimpin bangsa dan para elit politik harus memberikan keteladanan di dalam ketaatan dan kepatuhan terhadap segala bentuk perundang-undangan, peraturan dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



BAB – VII

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Dari pembahasan pada seluruh isi makalah yang telah dituangkan dalam bab-bab terdahulu, maka berkaitan dengan kesadaran kebangsaan Indonesia dari setiap warga negara dapat diketengahkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Sejarah kehidupan bangsa Indonesia telah menunjukkan bahwa bangsa yang mendiami kepulauan Nusantara merupakan suatu bangsa yang sangat majemuk dengan berbagai ragam adat istiadat dan kebudayaan.
- b. Sejarah kebangsaan Indonesia telah menunjukkan pula bahwa kemajemukan yang ada di samping merupakan kekayaan bangsa dan negara sekaligus juga merupakan kerawanan untuk terjadinya disintegrasi bangsa.
- c. Kondisi kemajemukan bangsa Indonesia yang merupakan kerawanan, di masa lalu telah dimanfaatkan oleh bangsa asing yang lebih maju untuk memecah belah dan menguasai seluruh wilayah Nusantara sebagai daerah koloninya. Pengalaman sejarah tersebut telah membuktikan bahwa bangsa asing memiliki kepentingan-kepentingan terhadap wilayah Nusantara.
- d. Pengaruh perkembangan strategis tidak dapat dipungkiri telah memberi andil terhadap tingkat kesadaran warga negara di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menjadi lebih nyata pada era globalisasi ini serta pada masa-masa mendatang. Karena perkembangan

2. Saran

a. Untuk dapat lebih mendorong terlaksananya peningkatan kesadaran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara para pemimpin bangsa dan para elit politik sebaiknya dapat segera merealisasikan “ Rekonsiliasi Nasional” , dengan tujuan menghapuskan segala bentuk dendam dan pertikaian di masa lalu dan selanjutnya bersama-sama menatap dan menata masa depan yang lebih cerah, yang didasari oleh kesadaran berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Di dalam menghadapi kondisi yang penuh ketidakpastian dewasa ini perlu ada kesepakatan yang menyeluruh dari seluruh anak bangsa mulai dari pemimpin bangsa, elit politik, tokoh masyarakat, generasi muda/mahasiswa untuk dapat memberikan ruang gerak yang sewajarnya bagi seluruh komponen bangsa termasuk Polri dan TNI agar dapat melaksanakan fungsinya untuk menciptakan keamanan negara. Untuk hal ini perlu segera direalisasikan pelaksanaan Undang-undang Penanggulangan Keadaan Bahaya, dengan terlebih dahulu mendorong pelaksanaan sosialisasinya dalam kehidupan masyarakat.



"ALUR PIKIR"

MENINGKATKAN KESADARAN KEBANGSAAN
INDONESIA BERDASARKAN SEMANGAT BHINNEKA
TUNGGAL IKA DALAM RANGKA MEMPERKOKOH
KETAHANAN NASIONAL

PARADIGMA
NASIONAL

KONFLIK-2
KEPENTINGAN

KEHIDUPAN
BERBANGSA
BERNEGARA

KESADARAN
MENURUN

KECENDERUNGAN
DISINTEGRASI

ANALISIS
FAKTOR-2
DISINTEGRASI

KESADARAN
YANG
DIHARAPKAN

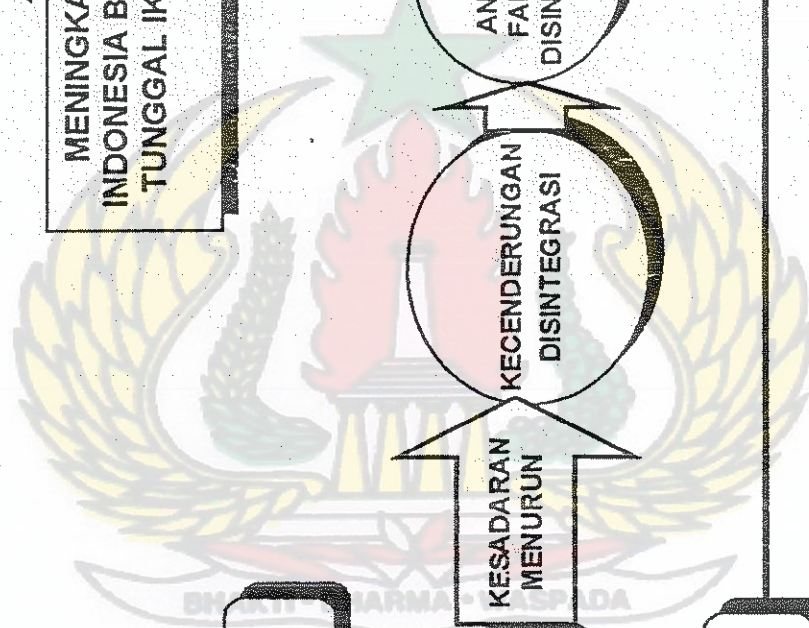
JAKSTRA

LINGSTRA

UPAYA-
UPAYA

JAMIN
PERSATUAN &
KESATUAN

INTEGRASI
NASIONAL



"ROLA PIKIR"

MENINGKATKAN KESADARAN KEBANGSAAN
INDONESIA BERDASARKAN SEMANGAT BHINNEKA
TUNGGAL IKA DALAM RANGKA MEMPERKOKOH
KETAHANAN NASIONAL

PANCASILA
UUD 1945
WASANTARA
TANNAS
GBHN

S	O	M
* PEMERINTAH	* SETIAP WARGA NEGARA INDONESIA	* KETELADAMAN
* LEMBAGA Pemerintah	* TOKOH MASYA- RAKAT (TOKOH ADAT, TOKOH AGAMA)	* SOSIALISASI
* PEMERINTAH DAERAH	* ELIT POLITIK	* EDUKASI
		* PERSUASIF
		* PEMBAURAN/ ASIMILASI

MENINGKATKAN
KESADARAN
KEBANGSAAN
INDONESIA
BERDASARKAN
SEMANGAT
BHINNEKA
TUNGGAL IKA
DALAM RANGKA
MEMPERKOKOH
TANNAS
SAAT
INI

MENINGKATKAN
KESADARAN
KEBANGSAAN
INDONESIA
BERDASARKAN
SEMANGAT
BHINNEKA
TUNGGAL IKA
DALAM RANGKA
MEMPERKOKOH
TANNAS YG
DIHARAPKAN

KOKOH
PERSATUAN
+
KESATUAN

INTEGRASI
NASIONAL

TUNAS

LINGSTRA
- GLOBAL
- REGIONAL
- NASIONAL
- PELUANG +
KENDALA

DAFTAR PENGERTIAN

1. Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri yang serba beragam dan lingkungan yang serba berubah serta bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah namun tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

2. Ketahanan Nasional

a. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam, untuk menjamin identitas, integrasi kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

b. Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara. Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia merupakan pedoman (sarana) untuk meningkatkan (metode) keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

3. Kesadaran Berbangsa

Kesadaran berbangsa adalah rasa memiliki kesatuan dengan sesama rakyat Indonesia sebagai bagian dari bangsa yang memiliki tanah air Indonesia dan memiliki bahasa persatuan yang sama, yaitu bahasa Indonesia serta memiliki cita-cita kehidupan yang sama menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan bathin.

4. Kesadaran Bernegara

Kesadaran bernegara adalah rasa pengertian yang tulus bahwa dirinya adalah bagian dari bangsa/masyarakat Indonesia yang hidup dalam wadah/wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur menurut tertib hukum, yaitu hukum nasional yang merupakan penjabaran dari hukum dasar, yang dijiwai oleh dasar negara/pandangan hidup bangsa.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. *Amandemen UUD 1945, Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Penerbit Sinar Grafika.
2. *UUD 1945 Dan Amandemen 1999*, GBHN 1999-2004, Tap-Tap MPR, Penerbit Pustaka Setia Bandung.
3. *Wawasan Nusantara (Naskah Sementara)*, Departemen Pertahanan RI, Lembaga Ketahanan Nasional.
4. *Ketahanan Nasional Indonesia*, Kelompok Kerja Tannas, April 2000, Departemen Pertahanan RI, Lembaga Ketahanan Nasional.
5. *Sebab-sebab Runtuhnya Suatu Negara*, Mayjen (Purn) Naryadi, (Mei 2000, Departemen Pertahanan RI., Lembaga Ketahanan Nasional.
6. *Telstranas 1996-2006, Nopember 1996*. Departemen Pertahanan RI, Lembaga Ketahanan Nasional.
7. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2*, Dr. R. Soekmono Edisi 3, 1981, Penerbit Konisius.
8. *Pandangan Negara Integralistik*, Marsilam Simanjuntak, Cetakan ke dua, 1997, Penerbit Pustaka Utama Grafiti.

====